

Pembangunan Indonesia dan JICA

Sejarah Kerjasama





Pembangunan Indonesia dan JICA Sejarah Kerjasama

Daftar Isi

I. Peta Lokasi Proyek Utama	3
II. Pembangunan Indonesia dan Kerjasama JICA	5
III. Menuju Tata Pemerintahan yang Lebih Baik	7
IV. Pembangunan Jaringan Infrastruktur	10
V. Menuju Pengembangan Industri	14
VI. Menuju Pembangunan Manusia dan Pranata Sosial	16
VII. Pelestarian Lingkungan dan Pembangunan Infrastruktur Sosial	19



Sejarah kerjasama JICA di Indonesia (sejak 1954)

- 1954 Dimulainya pelaksanaan Program Pelatihan di Jepang
- 1957 Dimulainya penugasan Tenaga Ahli Jepang di Indonesia
- 1958 Dimulainya pemberian bantuan dalam bentuk pampasan perang
- 1961 Pembentukan Dana Kerjasama Ekonomi Luar Negeri (OECF), sebagai pengembangan Dana Kerjasama Pembangunan Asia Tenggara (SADCF)
- 1962 Pembentukan Badan Kerjasama Teknik Luar Negeri (OTCA)
- 1968 Pembukaan Kantor Perwakilan OECF di Indonesia dan dimulainya pemberian Pinjaman ODA untuk Indonesia
- 1969 Pembukaan Kantor Perwakilan OTCA di Indonesia
- 1974 Perubahan OTCA menjadi Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA)
- 1976 Dimulainya pemberian Bantuan Hibah sebagai skema umum ODA Jepang
- 1988 Dimulainya penugasan Tenaga Ahli Muda (JOCV) Jepang di Indonesia
- 1999 Pembentukan Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional (JBIC) melalui merger antara OECF dan Bank Ekspor-Impor Jepang
- 2008 JICA merger dengan bagian Operasi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri JBIC serta mendapat pengalihan sebagian Bantuan Hibah dari Kementerian Luar Negeri Jepang dan membentuk JICA “baru”

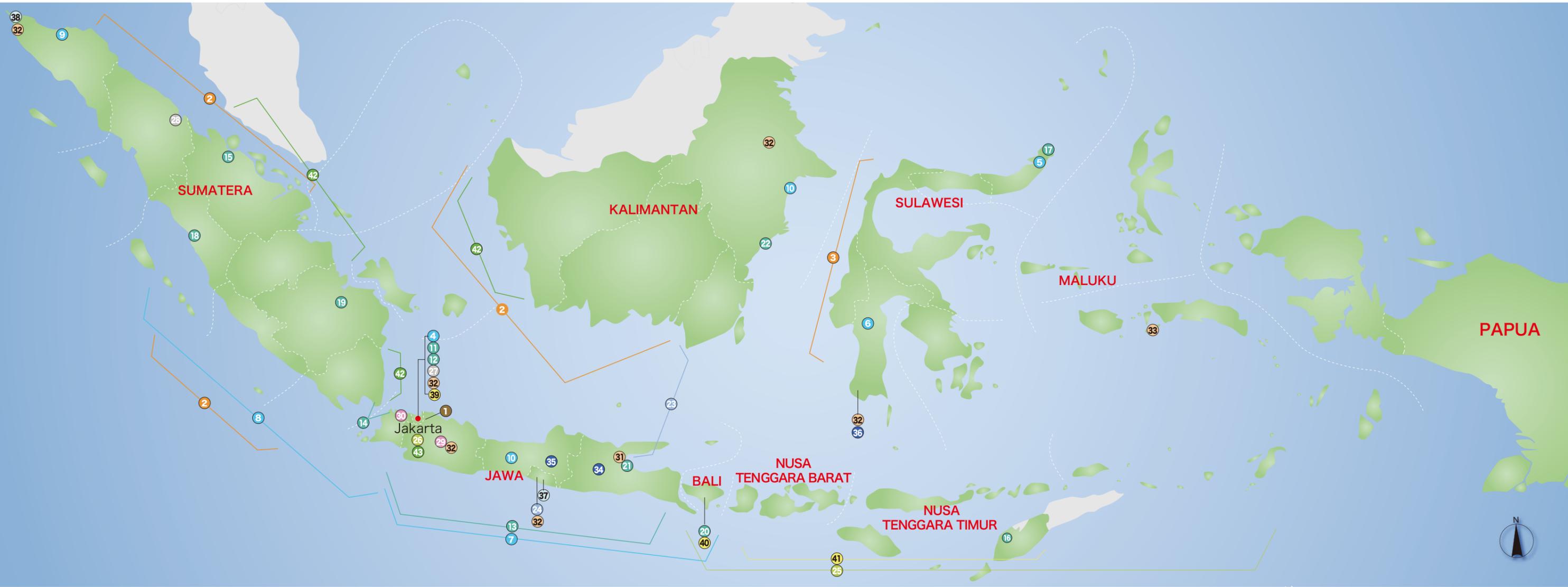
JICA

(Japan International Cooperation Agency atau Badan Kerjasama Internasional Jepang)



JICA adalah organisasi yang memegang peranan dalam melaksanakan Bantuan Pembangunan Resmi atau Official Development Assistance (ODA) Jepang. JICA memiliki kantor perwakilan di lebih dari 90 lokasi di berbagai negara, dan sedang melaksanakan berbagai kegiatan di lebih dari 150 negara. Pada 1 Oktober 2008, telah dilaksanakan merger antara JICA dengan bagian Operasi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri atau Overseas Economic Cooperation Operations yang awalnya merupakan salah satu unit Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional atau Japan Bank for International Cooperation (JBIC), serta sebagian Bantuan Hibah yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang juga dialihkan kepada JICA. Dengan adanya perubahan ini, JICA menjadi badan donor bilateral yang melaksanakan semua skema bantuan, yaitu Kerjasama Teknik, Pinjaman Bersyarat Lunak atau Pinjaman ODA dan Bantuan Hibah, sehingga diharapkan dapat menyediakan bantuan dengan lebih efektif dan efisien.

I. Peta Lokasi Proyek Utama



1. Kebijakan Ekonomi dan Pengelolaan Ekonomi Makro

Klasifikasi	Wilayah
P	
P	
S	
P	

2. Tata Kelola Pemerintahan

Klasifikasi	Wilayah
1	K, H JBR
	LW
	K
	K, H LW

3. Pengembangan Wilayah

Klasifikasi	Wilayah
2	S SBU, SBS, KBB
3	K SUL
	P LW

4. Tenaga Listrik dan Energi

Klasifikasi	Wilayah
4	P JKT
5	P SUT
6	P SSL
7	P LW
8	P LW
9	P NAD
10	P KTM
	S LW
	S LW

5. Transportasi dan Lalu Lintas

Klasifikasi	Wilayah
11	S, P JKT
	S, P LW
12	S, P JKT
13	P JW
14	P LPG, BNT
15	S, P RI
16	S, P NTT
17	S, P SUT
	K LW
18	S, P SMB
19	S, P SMS
20	S, P BL
21	P JTM
22	P KTM
	S LW
	P

6. Telekomunikasi

Klasifikasi	Wilayah
23	P LW
24	K, H DIY
	S LW

7. Pertanian dan Perikanan

Klasifikasi	Wilayah
	K, S, H, P LW
25	P NTT, NTB, MAL, SUL, BL
26	K, H, P JBR

8. Pembangunan Sektor Swasta

Klasifikasi	Wilayah
27	K, H JKT
28	S, P SMU
	S, K LW

9. Kesehatan dan Pelayanan Medis

Klasifikasi	Wilayah
	K LW
29	K, H JBR
30	P BNT

10. Pendidikan

Klasifikasi	Wilayah
31	K, H JTM
32	P
	S, K LW
33	K MAL

11. Pengembangan dan Pengelolaan DAS

Klasifikasi	Wilayah
34	S, P, K JTM
35	S, P JTG
36	S, P SSL

12. Manajemen Bencana

Klasifikasi	Wilayah
37	K, H DIY
	K LW
38	S, H, K, P NAD

13. Lingkungan Perkotaan dan Saluran Air dan Air Limbah

Klasifikasi	Wilayah
39	S, P JKT
40	S, P BL
41	S, H NTT, NTB

14. Konservasi Hutan dan Alam

Klasifikasi	Wilayah
42	K, H RI, JB, LPG, KBR
43	K, H JBR
	P

Legenda

- Kebijakan Ekonomi dan Pengelolaan Ekonomi Makro
- Tata Kelola Pemerintahan
- Pengembangan Wilayah
- Tenaga Listrik dan Energi
- Transportasi dan Lalu Lintas
- Telekomunikasi
- Pertanian dan Perikanan
- Pembangunan Sektor Swasta
- Kesehatan dan Pelayanan Medis
- Pendidikan
- Pengembangan dan Pengelolaan DAS
- Manajemen Bencana
- Lingkungan Perkotaan dan Saluran Air dan Air Limbah
- Konservasi Hutan dan Alam

Klasifikasi

K: Kerjasama Teknik
S: Studi Pembangunan
H: Bantuan Hibah
P: Pinjaman ODA

Wilayah

BL: Bali
BNT: Banten
DIY: Daerah Istimewa Yogyakarta
JB: Jambi
JBR: Jawa Barat
DKI: DKI Jakarta
JTG: Jawa Tengah
JTM: Jawa Timur
PUL: Pulau Jawa
KBB: Kalimantan bagian barat
KBR: Kalimantan Barat
KTM: Kalimantan Timur
LPG: Lampung
LW: Lintas-wilayah
MAL: Maluku
NAD: Nanggroe Aceh Darussalam
NTB: Nusa Tenggara Barat
NTT: Nusa Tenggara Timur
RI: Riau
SBS: Sumatera bagian selatan
SBU: Sumatera bagian utara
SMB: Sumatera Barat
SMS: Sumatera Selatan
SMU: Sumatera Utara
SSL: Sulawesi Selatan
SUL: Pulau Sulawesi
SUT: Sulawesi Utara

II. Pembangunan Indonesia dan Kerjasama JICA



Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum

Indonesia adalah negara berbentuk republik yang terletak di bagian selatan kawasan Asia Tenggara. Dengan luas wilayah 1,9 juta kilometer persegi (lima kali lipat dari Jepang), Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil. Sekitar 9.000 pulau di antaranya dihuni oleh sekitar 230 juta (2008) penduduk, terbanyak keempat di dunia dan merupakan tempat tinggal bagi orang-orang dari berbagai suku dan agama yang hidup berdampingan. “Bhinneka Tunggal Ika” (“Berbeda-beda tetapi tetap satu”) merupakan semboyan nasional Indonesia.

Sejarah Pembangunan

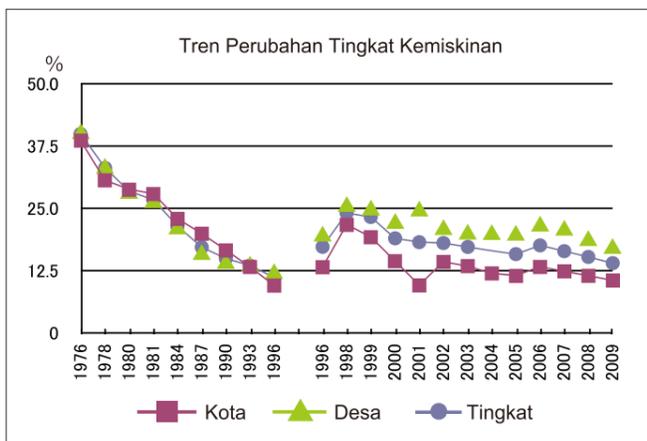
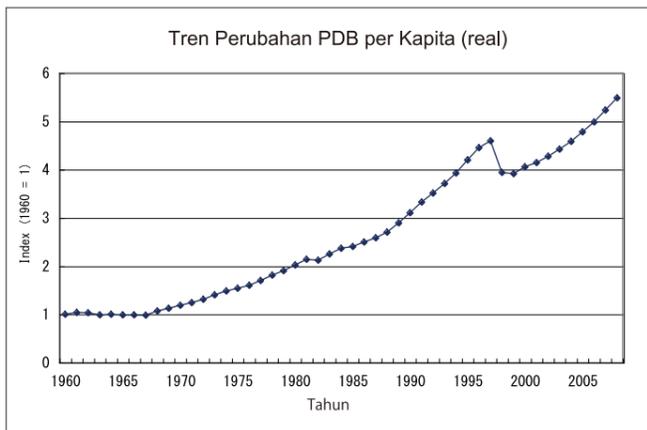
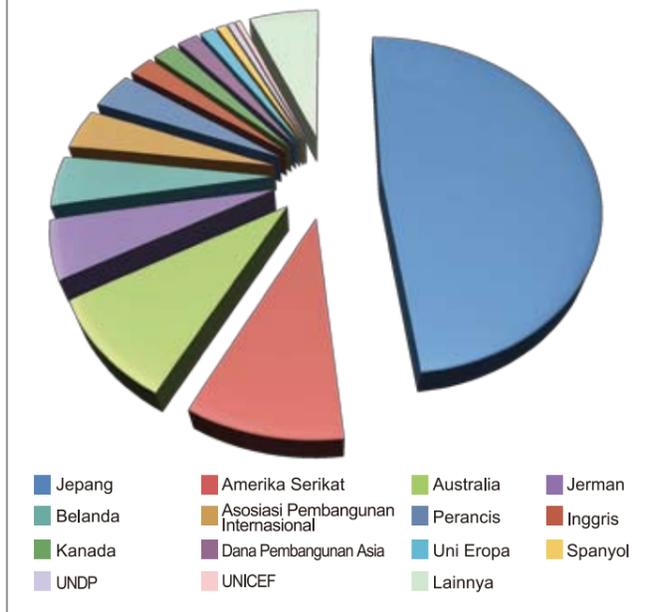
Saat ini Indonesia terus mengalami perkembangan dan stabil secara politik, serta sedang menjalankan berbagai reformasi, termasuk di dalamnya demokratisasi dan penanganan korupsi. Di panggung internasional, Indonesia merupakan anggota G20 dan telah menempatkan dirinya sebagai negara yang memiliki peranan penting dalam ASEAN.

Namun, bagi Indonesia, tidaklah mudah untuk sampai pada tahap ini. Sejak mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1945, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia yang sedang berusaha membangun persatuan dan kesatuan negara baru, harus menghadapi berbagai gejolak politik dan ekonomi. Namun, pada masa itu pula Indonesia memprakarsai suatu gerakan internasional, yaitu menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika yang pertama.

Pada Maret 1968, Soeharto mengambil alih kepemimpinan dari Presiden Soekarno, dan sejak itu Presiden Soeharto memfokuskan pada aspek pembangunan, merealisasikan swasembada beras, meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan dasar, meningkatkan indikator kesehatan. Pada akhir 1980-an, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi akibat penurunan harga minyak bumi internasional yang merupakan sumber utama devisa, namun Indonesia berhasil melalui kesulitan itu dan memasuki era penyesuaian struktural untuk keluar dari pembangunan ekonomi yang bergantung pada minyak bumi. Pada era ini dilakukan pergeseran kebijakan dari substitusi impor ke promosi ekspor; melaksanakan kebijakan untuk keluar dari ketergantungan terhadap minyak bumi dan diversifikasi struktur ekspor. Upaya untuk mengurangi kesenjangan antar daerah pun lebih maju pada era ini.

Pada 1997, Indonesia yang mulai kembali berada di jalur pertumbuhan lagi-lagi berhadapan dengan krisis yang berdampak bagi ekonominya, yaitu krisis mata uang Asia yang bermula di Thailand. Dampak negatif dari krisis tersebut seiring dengan akumulasi berbagai permasalahan yang muncul dari kekuasaan terpusat selama 30 tahun, berakibat pada ketidakstabilan politik dan ekonomi Indonesia dan berakhirnya kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, Indonesia melaksanakan berbagai proses reformasi dengan mendorong demokratisasi melalui amandemen konstitusi, seperti persamaan di hadapan hukum, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Selain itu, desentralisasi juga dikembangkan pada masa ini dengan mendelegasikan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat, dan sebagainya. Berbagai upaya di bidang reformasi ekonomi pun dilaksanakan. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan demokratisasi dan desentralisasi, namun upaya yang dilakukan selama ini – mulai dari Presiden B. J. Habibie, sampai dengan masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kedua ini, jelas telah menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.

Total Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) untuk Indonesia (Jumlah kotor)



Kerjasama JICA

JICA secara keseluruhan telah memberikan ODA kepada Indonesia sebesar 4,6261 triliun Yen¹. Dukungan untuk dua (2) sektor pembangunan, yaitu “pekerjaan umum dan pelayanan umum” (seperti transportasi, komunikasi, air dan sistem pembuangan, dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)) [1,7190 triliun Yen¹ atau 37%] dan “energi” [877,9 miliar atau 20%] mencapai 57% dari keseluruhan total ODA. Kemudian diikuti oleh dukungan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan [371,3 miliar Yen atau 8%] dan sektor pertambangan dan manufaktur [249,6 miliar Yen atau 5%].

Dalam sejarah kerjasama JICA di Indonesia, pada saat kondisi sosial ekonomi Indonesia stabil, JICA memberikan dukungan dalam rangka menyukseskan pembangunan Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia dan institusi. Sedangkan dalam masa krisis ekonomi dan keadaan darurat lainnya, JICA memberikan dukungan untuk menciptakan kestabilan sosial ekonomi, khususnya melalui Pinjaman Yen Non-Proyek².

Hasil dari Kerjasama dan Dukungan JICA

Kesuksesan pembangunan bangsa dan pembangunan sosial ekonomi Indonesia merupakan hasil upaya tak kenal lelah atas kemampuan masyarakat Indonesia sendiri. Namun, peran dan dukungan internasional, khususnya sepanjang perjalanan pembangunan Indonesia, tidak dapat diabaikan. Hasil dari 50 tahun dukungan JICA sebagai badan pelaksana ODA Pemerintah Jepang dapat dibagi menjadi empat kategori besar:

(1) Kontribusi dalam membangun stabilisasi kondisi sosial dan ekonomi JICA telah mendukung Indonesia dalam menanggulangi berbagai krisis yang berkaitan dengan neraca pembayaran internasional dan neraca fiskal melalui penyediaan Pinjaman Yen Non-Proyek pada masa-masa ketidakpastian ekonomi, termasuk ketidakstabilan ekonomi di awal masa pemerintahan Soeharto pada akhir 1960-an, stagnansi harga minyak mentah internasional pada akhir 1980-an, dan krisis mata uang Asia pada akhir 1990-an. Selain itu, JICA juga telah mendukung peningkatan ketahanan pangan Indonesia, yang merupakan elemen penting bagi stabilitas nasional, melalui pengembangan infrastruktur dan kerjasama teknik yang difokuskan pada pembangunan irigasi. JICA juga telah memberikan kontribusinya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kerjasama teknik di bidang kesehatan, sanitasi, dan kesehatan ibu-anak. Selain itu, mengingat Indonesia merupakan negara yang vulkanis sehingga rawan gempa bumi, JICA juga memberikan dukungan untuk pencegahan serta pemulihan paska-bencana alam.

(2) Kontribusi dalam menciptakan fondasi pembangunan sosial dan ekonomi nasional

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Oleh sebab itu, jaringan infrastruktur berperan sebagai fondasi untuk pembangunan ekonomi serta penghubung orang-orang dari satu pulau ke pulau lainnya. JICA telah berperan dalam pembangunan jaringan ini dengan memberikan dukungan penyusunan rencana induk dan dukungan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan melalui Pinjaman ODA. Selain itu, JICA tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi

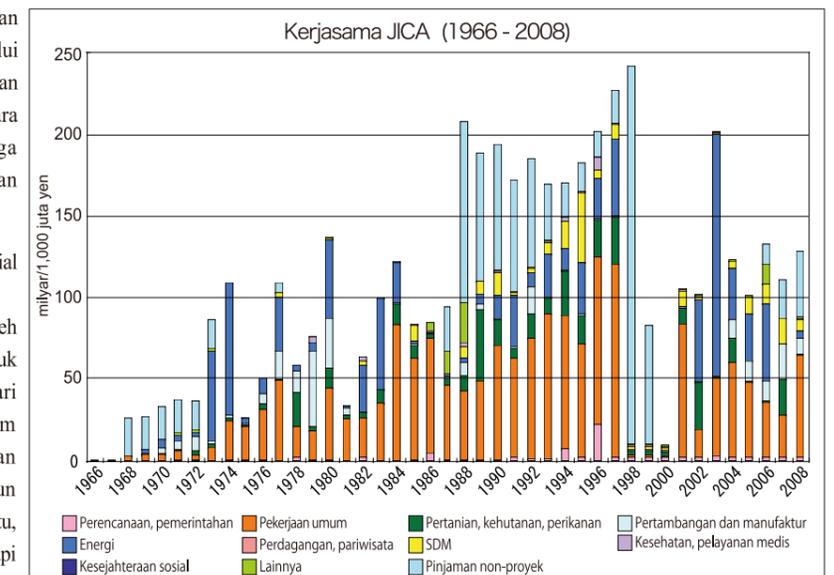


juga pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut. Pada 1970-an, JICA memberikan dukungan secara intensif untuk pengembangan minyak dan gas alam yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membantu memperkuat keuangan Pemerintah Indonesia. Selain itu, beberapa tahun belakangan ini JICA telah mendukung pengembangan berbagai institusi yang penting bagi pengaturan dunia usaha. Dukungan JICA terhadap pendidikan dan peningkatan standar penelitian pada institusi pendidikan tinggi juga telah menjadi fondasi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia.

(3) Penguatan kapasitas institusi pemerintah untuk mendukung pembangunan bangsa JICA telah memberikan dukungan dalam bentuk kerjasama teknik kepada berbagai institusi pemerintah Indonesia yang berpijak dari perspektif jangka menengah dan panjang. Kerjasama tersebut selalu difokuskan untuk penguatan institusi, pengembangan SDM, dan pengembangan institusi sebagai langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Model kerjasama JICA – dengan melibatkan pertimbangan bersama dan kolaborasi dengan pihak Indonesia – telah membantu untuk membangun institusi dan SDM yang dapat terus mengembangkan diri walaupun telah berakhirnya kerjasama.

(4) Mendorong demokratisasi dan desentralisasi Dalam menanggapi perkembangan Indonesia di bidang demokratisasi dan desentralisasi, JICA telah memberikannya untuk menyusun mekanisme secara konkrit yang sesuai dengan keadaan spesifik di Indonesia yang dikembangkan bersama-sama dengan para personel Indonesia berdasarkan pengenalan terhadap pengalaman di Jepang.

Kerjasama lebih dari 50 tahun yang telah dibangun, sejauh ini diyakini telah memberikan kontribusi dalam pembangunan Indonesia. Tentunya kerjasama dalam periode yang cukup panjang ini sekaligus dapat memperdalam interaksi dan saling pengertian di tingkat masyarakat. Hubungan bilateral yang erat ini merupakan aset penting dalam membangun basis kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dan Jepang di masa depan.



1. Total kumulasi untuk periode antara 1966 sampai dengan 2008.
2. Berbeda dengan Pinjaman Proyek yang menyediakan dana untuk proyek pembangunan tertentu, Pinjaman Yen Non-Proyek menyediakan dana dalam rangka membantu negara tertentu meningkatkan neraca pembayaran asingnya atau melaksanakan rencana pembangunan ekonomi atau rencana penyesuaian struktural, dengan tidak menyebutkan suatu proyek dengan tujuan tertentu.

III. Menuju Tata Pemerintahan yang Lebih Baik

Kebijakan Ekonomi dan Pengelolaan Ekonomi Makro



Tinjauan Umum

Dukungan Jepang untuk kebijakan ekonomi dan pengelolaan ekonomi makro diberikan dengan mengkombinasikan dua cara pendekatan. Pertama, secara cepat dan intensif untuk kepentingan stabilitas ekonomi, yaitu dengan cara membantu menjaga stabilitas neraca pembayaran internasional, dan yang lainnya adalah dengan cara bantuan jangka panjang yang berkelanjutan dengan tujuan utama untuk peningkatan kapasitas yang dilakukan dengan dukungan kerjasama teknik.

Dukungan JICA secara cepat dan intensif untuk stabilisasi ekonomi dilakukan dalam bentuk pinjaman non-proyek, atau yang biasa disebut pinjaman program. Sebagai contoh adalah bantuan yang diberikan pada saat krisis neraca pembayaran internasional yang terjadi tahun 1960-an dan 1970-an, krisis ekonomi yang disebabkan anjloknya harga minyak mentah di dunia di akhir tahun 1980-an, dan awal tahun 1997 krisis ekonomi akibat pengaruh krisis mata uang Asia. Pada akhir tahun 1990-an, bantuan yang diberikan termasuk untuk keperluan jaring pengaman sosial dan pinjaman untuk pengembangan sektor kesehatan dan gizi, dengan pertimbangan krisis ekonomi ini besar dampak buruknya terhadap rakyat yang rentan secara ekonomi dan sosial.

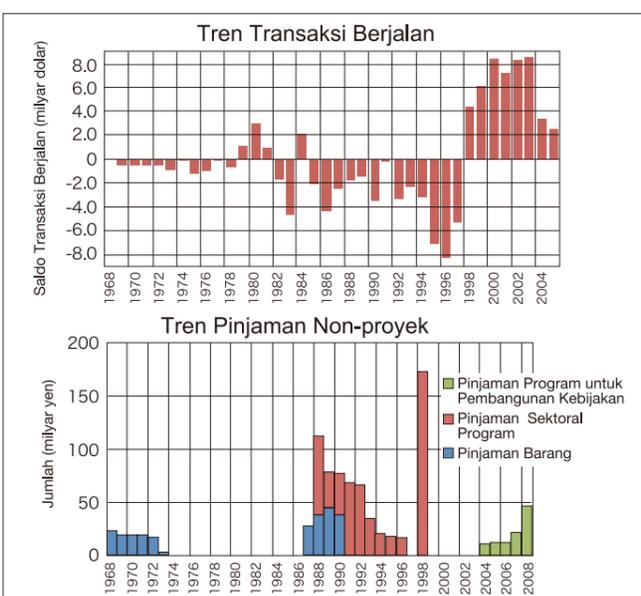
JICA juga memberikan bantuan teknik jangka panjang kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Diantaranya, yang memfokuskan pada analisa ekonomi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Selain itu, pada saat dimulainya krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an, Jepang memberikan kerjasama teknik untuk mendukung kebijakan ekonomi, dengan cara melakukan dialog antara para pembuat kebijakan dan para ahli ekonomi Jepang untuk menghadapi krisis ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, JICA memberikan bantuan keuangan untuk mendukung dan menciptakan iklim investasi (mis. Pengembangan lembaga, pengembangan infrastruktur dll), dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kondisi stabilitas ekonomi. Bantuan ini diberikan oleh JICA sebagai dukungan atas usaha-usaha reformasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa contohnya adalah "Pinjaman Program untuk Pembangunan Kebijakan" dan "Pinjaman Program untuk Pengembangan Reformasi Infrastruktur." Jepang juga membantu pengembangan sumber daya manusia, penataan kelembagaan pada bidang jasa keuangan dan administrasi perpajakan.

Hasil

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, JICA mengkombinasikan dua cara pendekatan dalam bantuan; yaitu cepat dan intensif untuk mengatasi masalah neraca pembayaran internasional dan stabilitas fiskal dengan tujuan utama memberikan dampak stabilitas ekonomi, dan melalui dukungan jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembangunan kapasitas dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan-pendekatan ini, maka JICA telah:

- Berkontribusi kepada Indonesia melalui bantuan secara cepat dan intensif untuk perbaikan neraca pembayaran internasional, pada saat krisis ekonomi, yakni ketika kondisi makro ekonomi Indonesia dalam keadaan sangat sulit, selama terjadi krisis neraca pembayaran internasional dan krisis mata uang Asia.
- Berkontribusi untuk peningkatan kemampuan pengelolaan makro ekonomi dengan memberikan kerjasama teknik dari berbagai sudut pandang, khususnya bantuan untuk perumusan perencanaan pertumbuhan ekonomi, dialog kebijakan selama krisis, reformasi institusi untuk menghadapi tekanan di bidang keuangan, pasar



Skema Pinjaman Program untuk Pembangunan Kebijakan (dimulai tahun 2005)

Adalah skema pembiayaan umum yang memberikan dukungan finansial berdasarkan pada pencapaian "pelaksanaan kebijakan" yang ditetapkan atas dasar pembicaraan dengan pihak Indonesia. Hal-hal yang ditetapkan sebagai indikator dalam pencapaian "pelaksanaan kebijakan" pada Pinjaman Program untuk Pembangunan Kebijakan ke-6, antara lain: meninjau peraturan investasi, persiapan terhadap penyatuan penanganan prosedur impor/ekspor, perumusan penyederhanaan dokumen perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan. Skema ini dapat dianggap sebagai bantuan yang sesuai dengan Komitmen Jakarta, yang menuju pelaksanaan terpadu atas kepemilikan (*ownership*) dan bantuan pendanaan (*aid funds*).



modal, perpajakan, dsb.; dan pengembangan sumber daya manusia.

- Mendukung usaha-usaha reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan memberikan bantuan terhadap usaha pemerintah Indonesia yang menekankan kepemilikan institusi dan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, dan secara simultan memberikan bantuan pembiayaan dan teknik.

Tata Kelola Pemerintahan

Tinjauan Umum

Kerjasama dalam hal pemerintahan adalah bidang yang relatif baru bagi JICA Indonesia. Di bawah rezim Soeharto yang berlangsung selama 30 tahun sampai tahun 1998, bantuan JICA untuk penataan statistik (antara lain berupa bantuan komputer untuk Biro Pusat Statistik) adalah salah satu contohnya. Penataan statistik termasuk perbaikan sensus penduduk, merupakan satu fondasi penting bagi negara, yang juga menjadi dasar bagi demokrasi di akhir 1990-an.

Sejak tahun 1998, kerjasama JICA dalam bidang ini telah meraih momentum seiring dengan meningkatnya demokrasi dan desentralisasi di Indonesia. Sebagai dukungan untuk menuju demokratisasi, JICA memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan pemilu, reformasi sistem peradilan (termasuk reformasi sistem penyelesaian masalah dan rekonsiliasi serta pembentukan skema training untuk mediator) dan juga reformasi kepolisian. Dukungan JICA untuk reformasi kepolisian berawal dari terpisahnya POLRI dari kesatuan TNI menjadi institusi yang mandiri pada tahun 1999 yang merupakan langkah maju untuk reformasi kepolisian, sebagai gerakan demokrasi dan juga pengalihan dari fungsi pengamanan negara menjadi fungsi untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Sejak tahun 2001, JICA bekerjasama dengan POLRI untuk membangun model untuk Polisi yang baru. Aktivitas yang dilakukan dalam hal ini membantu Polisi untuk "meraih kepercayaan mendasar dari masyarakat." Salah satu kegiatannya berupa mengenalkan sistem *koban* (pos polisi) versi Indonesia (selanjutnya disebut Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau BKPM) sebagai model dari *koban* Jepang. Aktivitas lain adalah memperkenalkan mekanisme polisi yang bertanggung jawab atas keamanan warga di wilayah hukumnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengakui efektivitas kegiatan kepolisian masyarakat dengan BKPM sebagai intinya dan kesesuaiannya dengan masyarakat Indonesia. Saat ini BKPM telah tersebar luas di seluruh Indonesia dengan dasar polisi berbasis masyarakat. Pada saat yang bersamaan, model baru perpolisian yang dibentuk dengan bantuan dari JICA telah menjadi sebuah kebijakan dalam bentuk POLMAS (Kepolisian Masyarakat versi Indonesia) yang bertujuan "membangun kemitraan petugas polisi dengan masyarakat" dan "memecahkan berbagai masalah sosial yang timbul dalam masyarakat."

Sebagai bantuan untuk desentralisasi, pada tiap sektor dilakukan proyek dengan tujuan penguatan fungsi yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat, selain itu pemerintah Jepang juga telah bekerja sama meningkatkan kapasitas Dewan Perwakilan Daerah dan aparat pemerintah daerah. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bagi para aparat pemerintah di daerah, kerjasama JICA ditujukan untuk mengembangkan kemampuan lembaga pelatihan di tingkat pusat dan daerah dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program pelatihan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebagai hasil dari kerjasama itu, dukungan kelembagaan untuk perubahan yang dibawa berkat kerjasama dengan pemerintah Jepang telah diberikan melalui, misalnya ditetapkannya "Pedoman Manajemen Pelatihan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2007)" oleh Kementerian Dalam Negeri.

Hasil

Seiring dengan langkah besar Indonesia menuju demokrasi dan desentralisasi, bantuan yang diberikan JICA tidak hanya menyampaikan pengalaman Jepang dan menerapkannya di Indonesia begitu saja, tetapi dengan cara membangun mekanisme yang disesuaikan dengan Indonesia dan pengembangan sumber daya manusia berkolaborasi dengan personil pendamping dari Indonesia. Dengan demikian hasilnya adalah:

- Demokratisasi polisi dan penciptaan mekanisme atau model khusus untuk pemerintah daerah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di Indonesia dalam sebuah paradigma baru demokrasi dan desentralisasi.
- Pada saat yang sama, JICA memberikan kontribusi pada pengembangan sumber daya manusia sehingga mampu untuk mengelola mekanisme baru tersebut.



BKPM merupakan adopsi dari pos polisi Jepang ("koban")



Alih kemampuan dan pengetahuan teknik identifikasi

Jalan menuju demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia

Dengan semangat Indonesia telah mempromosikan demokratisasi dan desentralisasi sejak mundurnya President Soeharto pada bulan Mei 1998. Demokratisasi terus bergerak bebas, partai-partai politik tumbuh subur, sistem minimal persentase pencapaian suara untuk mengikuti pemilu berikutnya dilakukan, perombakan DPR secara besar-besaran, dan dilaksanakannya pemilihan presiden dan pemimpin daerah secara langsung. Indonesia juga memisahkan institusi polisi dari kesatuan militer dan secara jelas membentuk institusi polisi sebagai abdi masyarakat. Indonesia juga menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama karena ini merupakan masalah yang telah berlangsung lama.

Untuk desentralisasi, Indonesia sedang berjuang keras untuk melaksanakan proyek-proyek yang memenuhi kebutuhan daerah dengan lebih baik. Termasuk pengalokasian dana belanja kepada pemerintah daerah, juga termasuk mengalihkan fungsi pemerintah pusat kepada kontrol pemerintah daerah. Dengan demikian penguatan kapabilitas/kemampuan dari pemerintah daerah yang belum banyak memiliki pengalaman dalam mengambil inisiatif dalam membuat perencanaan dan melaksanakan proyek merupakan hal yang sangat dibutuhkan.



Seminar untuk peningkatan pelayanan pemerintah berdasarkan konsep tata pemerintahan yang baik

Pengembangan Wilayah

Tinjauan Umum

Isu-isu utama pembangunan daerah di Indonesia sampai sejauh ini antara lain penyebaran penduduk dari Jawa ke pulau-pulau lainnya selama tahun 1960-1980-an, pembangunan Indonesia Timur dan perbaikan kesenjangan wilayah pada era 1990-an serta peningkatan kapasitas pembangunan daerah seiring dengan desentralisasi sejak tahun 2000-an.

Sejak tahun 1970-an hingga 1990-an, JICA bekerjasama untuk menyiapkan Rencana Induk pembangunan daerah yang komprehensif serta membantu pengformulasian program pembangunan yang lintas sektor dan komprehensif yang mencerminkan karakteristik kewilayahan. Pendekatan ini telah mendorong perubahan paradigma pendekatan pembangunan daerah yang lebih lintas sektor, komprehensif dan berbasis kewilayahan.

Pada tahun 1990-an JICA mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan lewat "Proyek Pengembangan Infrastruktur Daerah Pedesaan" yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Lalu pada pertengahan 1990-an, JICA melaksanakan "Proyek Penguatan Pembangunan Masyarakat Pedesaan Sulawesi" untuk Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan" di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Proyek ini mengembangkan Sistem Dukungan Pembangunan Pedesaan Partisipatif dalam mengimplementasikan berbagai proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pedesaan melalui kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pelaku pembangunan lokal lainnya seperti perguruan tinggi dan LSM. Pemerintah Kabupaten Takalar telah menetapkan peraturan daerah mengenai sistem dukungan ini dan hingga saat ini berbagai kegiatan telah berjalan dan dikembangkan, dengan mengikutsertakan berbagai penduduk lokal.

Seiring perkembangan desentralisasi, pada tahun 2000-an JICA mengimplementasikan "Proyek Pengembangan Kapasitas se-Sulawesi" untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, implementasi, monitoring serta umpan balik proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang dilaksanakan lewat kolaborasi berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan penguatan fungsi pemerintah daerah, JICA telah mendukung penguatan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah serta mendorong pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil

JICA telah mendukung upaya pembangunan daerah di Indonesia dalam dua bidang:

- 1) Pada era 1980-an dan 1990-an, JICA mendukung pengembangan Rencana Induk pembangunan daerah dengan titik berat pada pembangunan komprehensif yang berbasis kewilayahan.
- 2) Di tengah pesatnya perkembangan desentralisasi pada tahun 2000-an, JICA mendukung pengembangan kapasitas pemerintah daerah untuk mempromosikan pembangunan berbasis masyarakat.

Dukungan-dukungan tersebut mengarah pada hal berikut:

- Memperkenalkan pendekatan komprehensif dan lintas sektor yang berbasis kebutuhan kewilayahan dalam perencanaan pembangunan nasional.
- Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagai basis untuk mempromosikan inisiatif lokal dalam pembangunan wilayah.
- Kontribusi dalam membangun stabilitas nasional melalui pengurangan kesenjangan wilayah.



Proyek Pengembangan Kapasitas se-Sulawesi (2007- 2010)

Dengan menargetkan 29 kabupaten di enam provinsi di Sulawesi, Proyek Pengembangan Kapasitas se-Sulawesi mempromosikan inisiatif masyarakat dalam memecahkan masalah mereka serta mengembangkan sistem dimana pemerintah daerah bisa mendukung inisiatif tersebut secara memadai. Untuk mencapai hal tersebut, proyek menyediakan pelatihan untuk staf perencana di tingkat provinsi dan kabupaten serta untuk "fasilitator masyarakat" yang umumnya diseleksi dari anggota LSM. Kemudian proyek memfasilitasi pengimplementasian inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan anggaran pemerintah atau swadaya masyarakat, serta pembentukan mekanisme kolaborasi yang sesuai dengan keadaan setempat. Satu contoh kegiatan yang difasilitasi proyek dapat ditemukan di desa Maleo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Fasilitator masyarakat yang sudah dilatih proyek mengunjungi desa Maleo untuk mendorong diskusi antar masyarakat tentang isu pembangunan yang mereka hadapi. Hal ini lalu mengarah pada dialog dimana penduduk desa menyadari seriusnya permasalahan yang mereka hadapi, antara lain perembesan air laut ke sumur mereka serta erosi pada tepi laut. Hal ini pada akhirnya memicu kegiatan yang dipimpin oleh masyarakat setempat. Mereka memutuskan untuk menanam biji bakau. Pemerintah daerah yang kemudian mengenali inisiatif masyarakat tersebut, saat ini juga mendukung upaya tersebut. Hal ini menunjukkan: bagaimana fasilitasi terhadap desa yang dilakukan oleh fasilitator masyarakat yang sudah dilatih oleh proyek, akhirnya mengarah pada tindakan nyata terhadap pemecahan masalah.



Berdialog dengan penduduk setempat untuk memahami berbagai permasalahan yang mereka hadapi

IV. Pembangunan Jaringan Infrastruktur Tenaga Listrik dan Energi

Tinjauan Umum

Di sektor listrik, bantuan Pinjaman Jepang yang pertama ke Indonesia dimulai pada tahun 1968 yakni proyek pembangkit listrik tenaga air yang diwakili oleh proyek sungai Brantas di propinsi Jawa Timur. Sejak saat itu sampai sekarang, JICA telah banyak memberikan bantuan kerjasama di sektor listrik di Indonesia. Ketika Indonesia beralih ke era industrialisasi di tahun 1980-an, dimulailah secara aktif promosi pembangunan sektor listrik yang sangat penting bagi pertumbuhan industri sekunder. Indonesia mengajukan usulan dukungan ke pemerintah Jepang untuk mendukung industri pasokan listrik berdasarkan kebijakan ini, dan JICA merespon dengan memberikan dukungan secara komprehensif yang dimulai dari formulasi perencanaan pembangunan pembangkit listrik sampai dengan pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan pembangkit listrik.

Ketika situasi "permintaan dan persediaan" listrik diperketat di Indonesia yang disebabkan oleh terhentinya pembangunan pembangkit listrik sebagai dampak krisis mata uang Asia di tahun 1997, JICA membantu memperbaiki kondisi kritis di Indonesia dengan memberikan keputusan yang cepat dalam memberikan bantuan darurat pembangunan pembangkit listrik. Dalam beberapa tahun terakhir, JICA telah membantu mempromosikan penggunaan energi non minyak bumi dan energi terbarukan, seiring dengan kebijakan Indonesia, dan telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan energi panas bumi. Kerjasama JICA di sektor listrik di Indonesia meliputi ruang lingkup yang cukup luas dari mulai pembuatan Rencana Induk sampai dengan pembangunan sumber daya manusia. Dan di bidang pembangunan kapasitas pembangkitan atau perbaikan fasilitas pembangkit listrik, kontribusinya lebih dari seperempat fasilitas milik Negara (per tahun 2008). Di lain pihak, sektor energi yang diwakili oleh bidang pembangunan minyak dan gas bumi, merupakan sumber devisa yang sangat penting dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi Indonesia.

Di bidang ini, JICA telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan Indonesia dengan mendukung pembangunan sumber daya minyak bumi dan gas alam di tahun 1970-an. Meskipun akhirnya pembangunan melalui sektor swasta menjadi kebijakan umum, JICA masih terlibat, seperti dalam pelaksanaan proyek "Pembangunan Jalur Pipa Gas Sumatera Selatan-Jawa Barat" dalam beberapa tahun terakhir. Kegiatan ini akan meningkatkan volume transportasi gas alam dari sumbernya di Sumatera ke pulau Jawa.

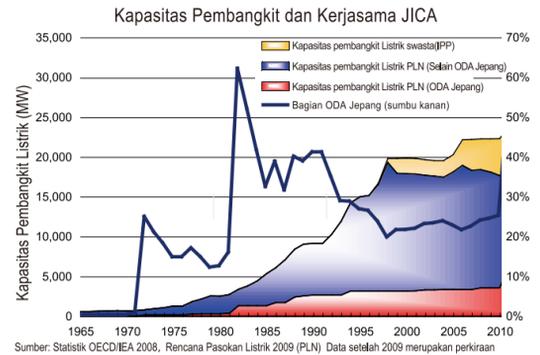
Hasil

Selama bertahun-tahun, JICA telah memberikan bantuan yang cukup luas dimulai dari pembuatan Rencana Induk sampai pada pembangunan sumberdaya manusia bagi sektor listrik dan energi di Indonesia. Sebagai hasilnya:

- Pada tahun 2008, JICA telah memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik dan pembangunan industri dengan menopang lebih dari seperempat pembangunan aset milik Negara dan perbaikan fasilitas di bidang kapasitas pembangkit listrik.
- JICA mendukung pembangunan sumber daya energi di Indonesia sampai dengan tahun 1980-an yang pada akhirnya menjadikan sektor ini menjadi pendorong perekonomian Indonesia.
- JICA menekan pengaruh negatif pada pembangunan ekonomi dengan mendukung perbaikan pembangkit listrik di Jawa-Bali, yang merupakan daerah permintaan listrik terbesar di Indonesia, setelah krisis mata uang Asia di tahun 1997. Ini juga memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi yang stabil dengan membuat persiapan bagi perluasan permintaan kebutuhan listrik.



Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) panas bumi Lahendong



Dukungan Darurat untuk Peningkatan Tenaga Listrik di Jawa-Bali

Dukungan ini berbentuk proyek Pinjaman ODA yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi keterbatasan persediaan tenaga listrik dalam kaitannya dengan pemulihan permintaannya pasca krisis keuangan Asia. Beberapa dari target dukungan tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, pengembangan PLTGU Muara Tawar, rehabilitasi PLTGU Semarang, pengembangan PLTGU Tanjung Priok, dengan total kapasitas 1.800 MW. Proyek ini dimulai pada 2003, dan dijadwalkan untuk mulai beroperasi pada 2012. Dengan terhubungnya Jawa – Bali melalui jalur transmisi 500kV sejak 2006, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang penting terhadap stabilitas pasokan listrik untuk Jawa – Bali, yang merupakan daerah permintaan listrik terbesar di Indonesia.



Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar

Transportasi dan Lalu Lintas

Tinjauan Umum

Sektor transportasi dan lalu lintas meliputi transportasi jalan, kereta api, penerbangan, serta pelabuhan dan dermaga (transportasi laut). Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi memainkan peranan penting dalam menghubungkan wilayah yang terpisah dan menjadi dasar pembangunan ekonomi. Selain itu, transportasi juga penting dalam menjaga persatuan nasional. JICA telah memberikan bantuan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang transportasi di setiap daerah dan era pemerintahan. Yang sudah dilakukan, di antaranya, menghubungkan semua sumber daya alam yang tersebar di seluruh negeri guna pembangunan yang adil yang memberikan keuntungan bagi daerah lain. Transportasi lebih ditekankan untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur yang disebabkan pertumbuhan transportasi dan untuk meningkatkan peran swasta yang berkesinambungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan metropolitan seperti Jakarta dan daerah perkotaan lainnya.

(1) Jalan

Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan jalan sebagai prioritas utama dalam 25 tahun rencana pembangunan nasional jangka panjang yang pertama (1969-1994). Di Indonesia, di mana pembangunan sektor kereta api terlambat di era pasca Perang Dunia, pembangunan jalan menjadi tumpuan pembangunan transportasi darat seiring dengan kemajuan otomotif. Saat ini, jalan memberikan kontribusi untuk mendukung 90% transportasi penumpang dan 50% untuk transportasi barang.

Di awal kerjasama dengan Indonesia pada tahun 1960-an, JICA lebih banyak mendukung kegiatan perbaikan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan aktifitas lain pada jalan-jalan utama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi daripada di Jawa. Salah satu dari jalan utama yang melewati pusat Sumatera, dari Bakauheni di Propinsi Lampung selatan sampai ke Banda Aceh di utara propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (total panjang jalan 2,500 km), Jepang telah membantu perbaikan ruas jalan sekitar 60%. Mulai tahun 1970 an, fokus kerjasama JICA beralih ke kota metropolitan Jakarta di mana perbaikan jalan tol di Jakarta dimulai. Diperkirakan 20% dari jalan bebas hambatan di Jakarta dikerjakan melalui kerjasama dengan JICA. Di tahun 1980 an, JICA mengarahkan perhatiannya ke jalan arteri dan perbaikan jembatan. Selama itu, metodologi dilakukan dengan membuat Rencana Induk dan tiap-tiap proyek di dalamnya dikerjakan dengan menggunakan sebagian atau seluruh skema ODA Jepang, yaitu bantuan pinjaman, kerjasama teknis, dan/atau bantuan hibah. Setelah itu, pada pertengahan 1990-an, JICA mulai memberikan dukungan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah pada umumnya. Di saat yang sama, JICA memulai dukungannya untuk memperkenalkan skema kemitraan pemerintah dan swasta untuk pembangunan jalan dan memberikan bantuan kerjasama di bidang rehabilitasi dan manajemen aset.

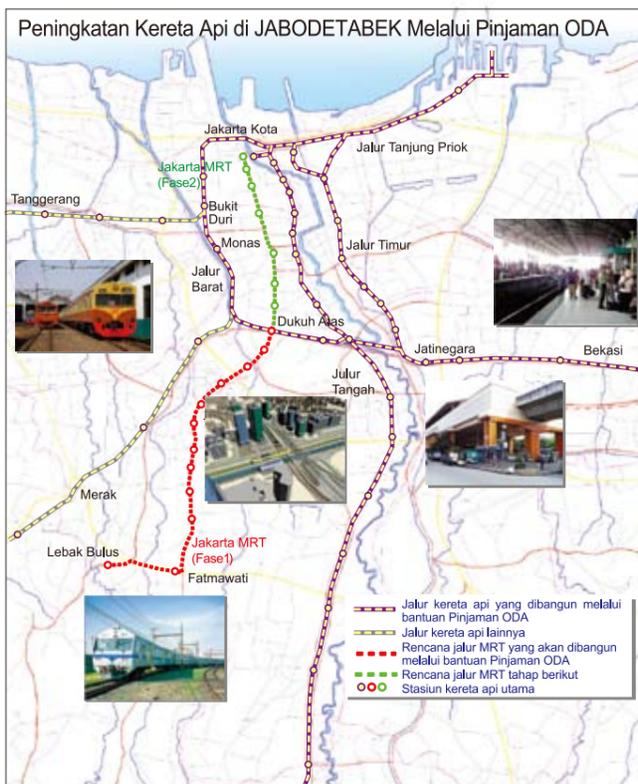
(2) Kereta Api

Di sektor kereta api, JICA telah mendukung perbaikan dan pembuatan jalur ganda di lintas utara dan selatan pulau Jawa sejak tahun 1960-an. Saat ini diperkirakan 50% jalur ganda sudah terealisasi melalui bantuan JICA. Adanya jalur ganda ini mengurangi tingkat kecelakaan dan mempercepat waktu tempuh antar lokasi. Banyak pekerjaan di proyek modernisasi kereta api di kota metropolitan Jakarta yang dimulai pada tahun 1976 dilakukan dengan bantuan pinjaman dari Jepang. Bantuan pinjaman tersebut mencakup berbagai aspek proyek seperti pengadaan rangkaian kereta api, perbaikan rel kereta api, pemasangan fasilitas komunikasi dan listrik, konstruksi depo dan bengkel, perbaikan stasiun, pemasangan sinyal, serta pembangunan jalur ganda dan jalur lintas atas pada jalur utama. Sebagai hasilnya, proyek ini membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di daerah



Jalan Tol Jakarta – Sumatera dan Terminal Feri

Jalan tol dari Jakarta ke Merak dan terminal feri Merak–Bakauheni dibangun dengan pinjaman ODA. Selain itu, JICA juga mendukung pengembangan 60% dari keseluruhan panjang jalan arteri utama yang melewati bagian tengah Sumatera; menghubungkan Banda Aceh (ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam) di bagian paling utara dan Bakauheni di bagian paling selatan pulau tersebut. Pembangunan terminal feri Merak – Bakauheni dimulai pada 1972, dan sebuah proyek untuk perluasannya dilaksanakan pada 1982. Saat ini, merupakan salah satu terminal feri terbesar di Asia karena menangani perpindahan banyak penumpang dan barang melalui 60 putaran feri per harinya. Jalan arteri utama dan terminal feri yang menghubungkan Jakarta dengan bagian ujung utara pulau Sumatera ini mendukung berbagai kegiatan industri di kedua pulau tersebut.



Stasiun Gambir di Jakarta



metropolitan, peningkatan efisiensi logistik dan pengurangan polusi udara. Sebagai tambahan, konstruksi sistem MRT Jakarta yang akan meningkatkan kapasitas transportasi dan merupakan kereta bawah tanah yang pertama di Indonesia, dijadwalkan juga dikerjakan dengan bantuan pinjaman Jepang. JICA juga memberikan bantuan kerjasama teknis untuk pemeliharaan kereta api dan perbaikan operasional.

(3) Penerbangan (Transportasi Udara)

Bagi Indonesia, negara dengan banyak pulau yang luas, penerbangan menjadi sarana transportasi yang penting yang dapat dilihat dari lonjakan kenaikan jumlah penumpang. JICA mendukung pembangunan sektor penerbangan yang dimulai dari perluasan bandar udara internasional di Bali di tahun 1980-an. Sejauh ini, JICA sudah membantu Pemerintah Indonesia dalam merespon pertumbuhan permintaan penerbangan dengan melakukan perbaikan di lima bandara. Sejak tahun 2000-an, JICA telah memberikan bantuan kerjasama teknis dalam sistem keamanan penerbangan dan keselamatan operasional sebagai kontribusi untuk keselamatan penerbangan, dan membantu mempersiapkan Rencana Induk untuk pembangunan sarana penerbangan jangka panjang.

(4) Pelabuhan dan Dermaga (Transportasi Laut)

Karena Indonesia adalah negara kepulauan, transportasi laut menjadi moda transportasi yang sangat penting dan mencakup pangsa pasar yang cukup luas baik barang maupun penumpang. JICA telah mendukung perbaikan pelabuhan utama Tanjung Priok (peringkat ke-26 di dunia berdasarkan kapasitas kontainer per tahun (2008), sementara pelabuhan Tokyo menduduki peringkat ke-24); pelabuhan Semarang, pelabuhan Dumai yang berfungsi sebagai pelabuhan ekspor minyak sawit; pelabuhan Makassar di timur Indonesia, pelabuhan Bitung dan pelabuhan Kupang. JICA juga membantu pembangunan terminal Merak – Bakauheni yang menghubungkan Jawa dan Sumatera di awal tahun 1970-an. Fasilitas ini terus berkembang menjadi salah satu terminal feri terbesar di Asia.

Hasil

JICA telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan sektor transportasi dan infrastruktur lalu lintas yang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk dukungan sejalan dengan kebijakan di setiap era pemerintahan Indonesia. Selain itu, JICA telah memberikan kontribusi dalam menjaga persatuan nasional dengan cara membantu membangun jaringan yang menghubungkan penduduk di daerah-daerah yang terpisah. Secara spesifik, JICA telah :

- Mendukung perbaikan jalan bebas hambatan dan modernisasi kereta api di kota metropolitan Jakarta dan memberikan kontribusi yang besar dalam rangka efisiensi pergerakan penduduk dan barang di daerah metropolitan, yang berpengaruh besar pada efisiensi di sektor industri.
- Mendukung kegiatan industri di Sumatera dan Jawa dengan membantu perbaikan jalan dan terminal feri yang menghubungkan lokasi-lokasi antara Jakarta dan berbagai daerah di Sumatera. JICA juga mempromosikan penggunaan kereta api di Jawa di mana industri terpusat dan pengurangan tingkat kemacetan sebagai aspek yang penting dengan mendukung perbaikan jalur ganda di lintas utara dan selatan Jawa.
- Mendukung pengembangan bandara dan pelabuhan/dermaga, dan mempromosikan pembangunan jaringan transportasi yang penting bagi pergerakan penduduk dan barang di pulau-pulau yang terpisah.



Bandar Udara Internasional Minangkabau (Padang-Sumatera Barat)

Peningkatan Bandar Udara

Sampai saat ini, JICA telah memberikan dukungan untuk pembangunan atau perluasan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Denpasar, Minangkabau di Padang, Sepinggan di Balikpapan, Juanda di Surabaya, dan Sultan Mahmud Badaruddin di Palembang. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Bali, yang merupakan tujuan wisata dunia, menerima wisatawan dari seluruh dunia. Sedangkan Bandar Udara Internasional Juanda di Surabaya saat ini melayani 60 penerbangan per hari antara Jakarta–Surabaya, sehingga merupakan ruas penerbangan keempat tersibuk di Asia. Pada 2009, bandar udara di Padang terkena bencana gempa, namun tidak mengalami kerusakan besar. Bandar udara itu tidak mengalami penutupan setelahnya, dan bahkan telah berperan besar dalam melayani kegiatan penyelamatan, pengiriman barang bantuan oleh Pemerintah Indonesia maupun negara-negara sahabat.



Terminal feri Bakauheni (Lampung)



Terminal feri Merak (Banten)

Telekomunikasi



Pelatihan produksi program TV melalui praktek dalam studio (MMTC)

Tinjauan Umum

Di sektor telekomunikasi termasuk komunikasi, yang diwakili oleh pelayanan telepon dan bidang penyiaran.

Dalam bidang telekomunikasi, pada akhir tahun 1960-an, kebutuhan Indonesia akan infrastruktur yang lebih baik mengalami pertumbuhan yang pesat dan memasuki era tahun 1970-an, perbaikan jalur komunikasi antar pulau menjadi tujuan utama. JICA telah mendukung perbaikan jaringan komunikasi antar pulau dan telah memberikan bantuan perencanaan dan keuangan untuk memperluas jaringan telepon di kota metropolitan Jakarta.

Sejak pertengahan 1970-an sampai 1980-an, JICA telah mendukung perbaikan jaringan telepon di kota metropolitan Jakarta maupun jaringan di kota besar lainnya seperti Surabaya dan Makassar. Selain itu, JICA juga telah mulai memberikan bantuan untuk pembuatan Rencana Induk di bidang komunikasi.

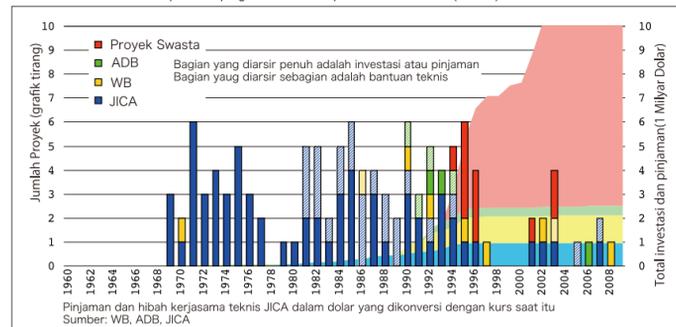
Sejak pertengahan 1980-an, JICA membantu pemasangan jaringan kabel komunikasi bawah laut yang menghubungkan antar pulau, dan kabel bawah laut ini menjadi kunci jaringan komunikasi. Memasuki tahun 1990-an, JICA mulai membantu pengembangan sumber daya manusia di bidang pemeliharaan jaringan telepon. Dan sejak pertengahan tahun 1990-an perhatian kerjasama beralih ke arah rekomendasi kebijakan dalam pembuatan strategi komunikasi dan hal lainnya, yang memacu pembangunan infrastruktur melalui kerjasama dengan investasi swasta.

Di bidang penyiaran, JICA mulai membantu dalam pendirian berbagai stasiun televisi dan radio di tahun 1970-an. Dan memasuki tahun 1980-an, JICA memberikan kerjasama dalam pembuatan Rencana Induk di bidang penyiaran. Dalam waktu yang sama, JICA memulai kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan bagi teknisi penyiaran dan saat ini hasil kerjasama JICA menjadikan Multi Media Training Center (Pusat Pelatihan Multi Media) sebagai satu-satunya lembaga pelatihan penyiaran yang menerima peserta pelatihan baik dari pemerintah maupun swasta. Dalam kenyataannya, lembaga ini telah menjadi lembaga pelatihan internasional yang bahkan menerima siswa dari negara lain.

Hasil

Sebagai tambahan dalam mendukung pembuatan dan pendirian rencana pembangunan jaringan telekomunikasi, JICA telah memberikan kerjasama teknis di bidang rekomendasi kebijakan, pemeliharaan dan manajemen. Di bidang penyiaran, JICA telah mendukung perbaikan fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia. Sebagai hasilnya:

- JICA telah memberikan kontribusi dalam kelancaran kegiatan ekonomi melalui perbaikan jaringan telekomunikasi. Hal ini juga berperan dalam menghubungkan penduduk yang besar dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
- JICA telah membantu perbaikan penyiaran Radio dan Televisi yang telah berperan dalam penyebaran informasi dan integrasi sosial di negara yang memiliki wilayah luas. Selain itu juga memberikan kontribusi dalam pelatihan bagi teknisi penyiaran di radio dan televisi dengan memperkuat lembaga penyiarannya.



Proyek Kabel Optik Bawah Laut Surabaya – Banjarmasin (1987-1992)

Proyek ini meliputi pemasangan kabel optik bawah laut sepanjang 400 km antara pulau Jawa dan pulau Kalimantan. Proyek ini bertujuan untuk 1) merespon kebutuhan telekomunikasi antara kedua pulau yang makin besar dan beragam, dan 2) memastikan keamanan dan kehandalan telekomunikasi sambil mempromosikan pertukaran antara kedua pulau serta pembangunan ekonomi pulau Kalimantan. Proyek ini tidak hanya berhasil memperbesar volume telekomunikasi antara kedua pulau, tetapi juga meningkatkan akurasi komunikasi dengan cara memperkenalkan saluran transmisi digital. Saat ini, infrastruktur tersebut terus berperan sebagai suatu kunci utama dalam sistem telekomunikasi Indonesia.



Suasana praktik pengoperasian kamera studio (MMTC)

V. Menuju Pengembangan Industri Pertanian dan Perikanan

Tinjauan Umum

Tantangan utama bagi Indonesia setelah kemerdekaan adalah swasembada beras yang merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Dari tahun 1960-an sampai hingga 1970-an, sejalan dengan kebijakan Indonesia untuk mencapai swasembada beras, JICA memberikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi irigasi, serta kerjasama teknis untuk meningkatkan produksi beras. Dengan memanfaatkan pengalaman tersebut, dengan menghubungkan masing-masing program kerjasama untuk menciptakan efek sinergi, pada tahun 1980-an "payung kerjasama" program pertanian mulai dilaksanakan secara terencana melalui berbagai proyek yang berkaitan di bawah satu program. Payung kerjasama dilaksanakan sebanyak tiga kali sejak tahun 1980, dan berkontribusi pada swasembada pangan Indonesia yang bertumpu pada beras. Selain itu, tidak hanya memberikan dukungan untuk meningkatkan produksi beras, ketika terjadi kekurangan beras di Indonesia pada tahun 1960-1970-an dan di akhir 1990-an, Pemerintah Jepang memberikan bantuan pangan dengan memasok beras bantuan untuk menjamin ketahanan pangan serta mengurangi beban neraca pembayaran internasional.

Lebih daripada itu, sebagai bentuk hasil kerjasama JICA dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam hal – pengembangan infrastruktur kampus, penguatan kapasitas penelitian, serta pendirian program pasca sarjana – institut tersebut telah berhasil menjadi universitas terkemuka yang menjadi rujukan bagi universitas/ institut di bidang pertanian, dimana juga memberikan kontribusi pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas di bidang pertanian, serta penguatan fakultas pertanian bagi kepentingan universitas/ institut di bidang pertanian. Kerjasama JICA di bidang perikanan, dilakukan terutama pada dua bidang, yakni: "peningkatan pelabuhan perikanan tangkap dan pemasarannya," serta "budidaya perikanan" untuk diversifikasi pendapatan nelayan dan petani. Program JICA di bidang pengembangan pelabuhan perikanan awalnya difokuskan pada pembangunan Pelabuhan Perikanan di wilayah Jakarta pada tahun 1970-an, yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan pelabuhan perikanan di daerah lain pada tahun 2000-an. "Budidaya" yang dikembangkan JICA mulai tahun 1970-an menggalakkan kerjasama, dimana pada tahun 2000-an dilakukan kerjasama teknis untuk budidaya air tawar di Propinsi Jambi. Kerjasama di bidang peternakan telah dimulai sejak tahun 1970-an. Kerjasama teknis dilakukan di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari di Propinsi Jawa Timur, yang saat ini menjadi pusat untuk penjualan dan distribusi benih beku ke wilayah tersebut. Selain itu, JICA telah bekerjasama untuk promosi peternakan sapi perah di Propinsi Jawa Barat, kemudian beberapa tahun terakhir, melakukan kerjasama untuk membantu produksi sapi potong di Propinsi Nusa Tenggara Barat, penanggulangan berbagai penyakit hewan (seperti flu burung, dan lain-lain).

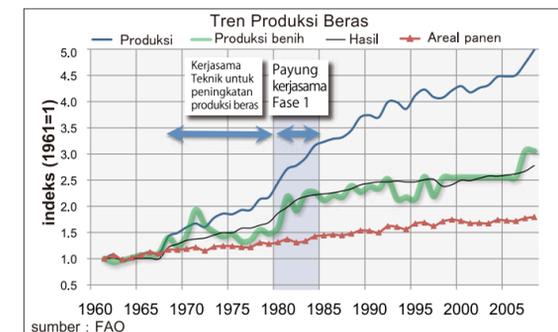
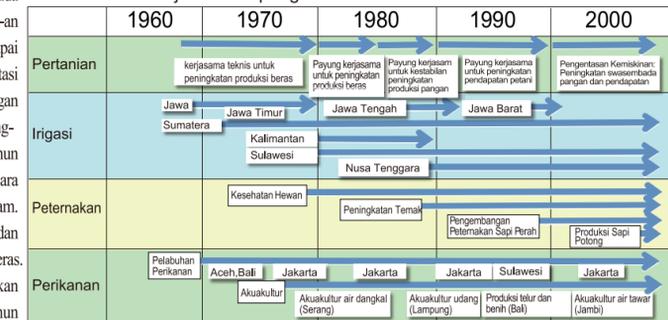
Hasil

JICA telah mendukung Pemerintah Indonesia untuk fokus pada peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan petani. Melalui hal ini, JICA telah :

- Berkontribusi pada peningkatan produksi melalui pelaksanaan pembangunan fasilitas irigasi, peningkatan sisi teknologi dan pembangunan infrastruktur melalui penguatan kelembagaan seperti penelitian pertanian, penanggulangan hama serangga, peningkatan pengolahan pasca panen, pengembangan sumberdaya manusia.
- Berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia tingkat tinggi pada bidang pertanian, dengan membantu pembangunan fasilitas Institut Pertanian Bogor dan meningkatkan kemampuan penelitian.
- Berkontribusi pada promosi perikanan melalui pembangunan untuk perbaikan pelabuhan perikanan di Jakarta, sebagai sentra perdagangan produk perikanan di Indonesia serta lokasi lainnya.
- Berkontribusi pada peningkatan produktivitas ternak melalui kerjasama pada pusat inseminasi buatan dan sektor kesehatan hewan.



Tren Kerjasama Jepang dalam Industri Pertanian dan Perikanan



Payung Kerjasama Pertama untuk Peningkatan Produksi Beras Terpadu

Untuk peningkatan produksi beras terhadap berbagai bidang, dilakukan kerjasama pertama selama tahun 1981-1985 dimana kerjasama itu merupakan kerjasama komprehensif yang mengkombinasikan kerjasama teknis, hibah dan bantuan. Sebagai latar belakang, kerugian serangan hama dan penyakit berlanjut dari tahun 1970-an, sehingga meskipun produksi padi meningkat namun hasil panen padi buruk sehingga jumlah produksi beras tidak bertambah. Dalam kerjasama ini, dikombinasikan langkah-langkah peningkatan hasil seperti peningkatan produktivitas melalui perlindungan tanaman melalui pengendalian hama dan peningkatan teknologi pengolahan pasca panen.



Sapi perah yang digunakan untuk uji keturunan (Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari)



Peningkatan prasarana dan kerjasama teknis untuk meningkatkan produksi pangan

Pembangunan Sektor Swasta

Tinjauan Umum

Dalam rangka pengembangan sektor swasta dan mendorong investasi swasta dari dalam dan luar negeri, perlu memperkuat daya saing industri perusahaan seperti peningkatan teknologi dan sumber daya manusia.

Pada era 1960-an, badan-badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak pada industri soda api, pembuatan kertas, pakaian jadi, dan sektor yang lain, menjadi tulang punggung sentor industri di Indonesia dan JICA menyediakan bantuan dalam hal perbaikan infrastruktur pabrik-pabrik yang dimiliki oleh badan-badan usaha milik negara tersebut. Di kemudian hari, pada era 1970-an, pemerintahan di bawah presiden Soeharto bertumpu pada sektor pembangunan, sehingga hasil perbantuan JICA yang sudah dimulai sejak era 1960-an terhadap fasilitas/ infrastruktur pabrik, memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Atas dasar tersebut, kerjasama JICA dilanjutkan dengan menitikberatkan pada penguatan badan-badan usaha milik negara dan industri terkait. Pada periode ini, proyek nasional bernama "Proyek Aluminium Asahan" diluncurkan dengan pendirian perusahaan patungan pemerintah Indonesia dengan aliansi 12 perusahaan swasta Jepang. Dukungan JICA di bidang pelatihan kejuruan pada sekolah-sekolah kejuruan bidang industri di wilayah Sulawesi dimulai pada era yang sama. Kerjasama ini dilanjutkan terhadap Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (CEVEST) di tahun 1980-an. Memasuki paruh akhir tahun 1980-an, perekonomian Indonesia mengalami kemunduran akibat merosotnya harga minyak bumi, yang membuat Indonesia mencari solusi alternatif untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Karenanya, Indonesia bekerja keras untuk mencapai diversifikasi industrialisasi dan kapasitas ekspor melalui pengenalan modal dan teknologi asing. Dalam rangka menunjang perusahaan-perusahaan eksportir, JICA membantu untuk mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor sebagai suatu fasilitas untuk mempromosikan ekspor oleh usaha kecil dan menengah (UKM) dan memfasilitasi penyusunan strategi dalam rangka menumbuhkembangkan industri ekspor. Ketika tahun 1990-an, dengan melihat kecenderungan peningkatan keinginan untuk mempromosikan ekspor melalui Pembangunan Industri dan menarik investasi asing di Indonesia, kerjasama Jepang pun beralih untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan investasi seperti promosi industri penunjang, promosi investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan lain-lain.

Gerakan ini menghadapi perubahan besar dalam krisis mata uang Asia pada tahun 1997. Di Indonesia sejak krisis mata uang Asia, telah diakui kembali pentingnya membangun UKM dalam kegiatan ekonomi, sehingga dipromosikan kerjasama dalam pengembangan UKM. Dalam kondisi ini, dilakukan kerjasama untuk membangun klaster industri bagi perusahaan skala kecil dan kerjasama yang bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia yang mendukung pengembangan UKM. Berdasarkan kerjasama kedua, ditetapkan lisensi nasional bagi konsultan bisnis perusahaan kecil versi Indonesia, saat ini pun dilakukan pelatihan konsultan dengan anggaran pemerintah Indonesia dengan target aparat pemerintah daerah. Sejak tahun 1990-an bantuan pengembangan lingkungan bisnis dan investasi yang selama ini telah dilakukan, menjadi makin penting sejak memasuki tahun 2000-an, kemudian dilakukan kerjasama teknis yang bertujuan untuk melakukan pengembangan dan perbaikan secara konkrit terhadap hal-hal seperti kerangka persaingan yang adil, hak kekayaan intelektual, administrasi perpajakan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan lain-lain. Selain itu JICA juga memberikan "Pinjaman Program untuk Kebijakan Pembangunan" untuk mendukung inisiatif Pemerintah Indonesia dalam rangka reformasi birokrasi dan institusi.



Produksi aluminium di Asahan



Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI)

Sejak tahun 1986, telah diluncurkan serangkaian proyek yang terkait "Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (Indonesia Export Training Center: IETC)." Pada proyek ini bangunan dan peralatan disediakan di bawah skema bantuan hibah, kemudian dilaksanakan kerjasama teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan PPEI dalam melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pelatihan agar dapat memberikan pengetahuan yang diperlukan di bidang perdagangan kepada perusahaan-perusahaan. Melalui kerjasama ini, pada tahun 2000-an dilaksanakan proyek yang bertujuan untuk memperkuat Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (RETPC), dengan mendirikan fasilitas untuk melaksanakan pelatihan yang sama di daerah.

Hasil

Kerjasama Jepang, terus merespon kebutuhan yang berubah sejalan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia, dan telah membantu pengembangan sektor swasta di Indonesia. Dari hal ini:

- Untuk meningkatkan ekspor, dilakukan pengembangan sumber daya manusia baik di pemerintah maupun sektor swasta.
- Mendukung formulasi strategi untuk pengembangan usaha kecil dan pembentukan sistem "konsultan manajemen UKM," dan membuat kerangka pengembangan sumber daya manusia yang mendukung hal itu.
- Membantu peningkatan dan pengembangan nyata lingkungan bisnis dan investasi.



Gedung CEVEST di Bekasi

VI. Menuju Pembangunan Manusia dan Pranata Sosial

Kesehatan dan Pelayanan Medis

Tinjauan Umum

Pada sektor perawatan medis dan kesehatan, JICA telah memberikan bantuan pada bidang-bidang terutama keluarga berencana dan kesehatan ibu dan anak, pengembangan rumah sakit, kesehatan daerah, penanggulangan penyakit menular, obat-obatan, dan kesejahteraan sosial.

Tahun 1960 tingkat kelahiran tinggi, pertumbuhan penduduk yang cepat, bagi Pemerintah Indonesia yang mengkhawatirkan dampak sosial dan ekonominya, pengurangan tingkat kelahiran adalah masalah besar. Jepang, pasca Perang Dunia Kedua, dalam waktu yang singkat telah berhasil mensosialisasikan Keluarga Berencana (KB) sehingga berhasil menurunkan angka kematian bayi dan tingkat kelahiran. Melihat keberhasilan tersebut, Pemerintah Indonesia mengusulkan kerja sama di bidang KB, yang dimulai pada tahun 1969 melalui pelaksanaan "Proyek Keluarga Berencana" JICA. Seiring penurunan angka kelahiran bayi di Indonesia pada akhir 1980-an, fokus dialihkan dari KB kepada kesehatan ibu dan anak (KIA). JICA memberi bantuan untuk mengembangkan dan mempromosikan "Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) edisi Indonesia" yang telah disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan berbagai daerah di Indonesia. Program Buku KIA diinisiasi oleh salah satu peserta pelatihan di Jepang yang mempelajari tentang Buku KIA Jepang. Buku KIA ini kemudian menyebar secara nasional, dan sekarang didistribusikan kepada sampai lima juta ibu hamil per tahun; bermanfaat dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran ibu.

Untuk pengembangan rumah sakit, dari akhir 1970-an selain berupaya melakukan pemenuhan fasilitas rumah sakit dengan melakukan peningkatan kapasitas rumah sakit, penyediaan fasilitas medis, perluasan fasilitas, serta melakukan kerjasama teknis, JICA juga memberi bantuan pada pengembangan sumber daya manusia melalui pembangunan fasilitas untuk pendidikan keperawatan, serta peningkatan kapasitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dari tahun 1990-an dengan pertimbangan bahwa vaksin polio dan campak sebaiknya diproduksi di dalam negeri, maka diadakan kerjasama teknis terkait dengan produksi vaksin, penyediaan fasilitas manufaktur dan peralatan. BUMN perusahaan farmasi PT. Bio Farma terus berkembang, antara lain bekerjasama dengan JICA melakukan training bagi negara-negara lain dan ekspor vaksin polio dan campak ke luar negeri.

Sejak tahun 2000-an, telah memberikan bantuan untuk upaya penguatan kesehatan daerah sebagai tanggapan atas desentralisasi dan tindak lanjut melawan penyakit menular baru (flu burung) serta munculnya kembali penyakit menular lama (TBC).



Seorang ibu dan bayinya yang menggunakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)



Bangunan tempat produksi vaksin polio-campak yang dibangun JICA(1991)

Kerjasama dalam Produksi Vaksin

JICA telah menyediakan fasilitas dan peralatan untuk pembuatan vaksin serta melaksanakan kerjasama teknis untuk produksi dan pengelolaan vaksin polio dan campak untuk PT. Bio Farma, sebuah BUMN di bidang farmasi.

Saat ini, vaksin polio/campak yang dihasilkan oleh PT. Bio Farma menguasai 100 persen pasar domestik untuk vaksin tersebut, serta diekspor ke negara-negara lain. PT. Bio Farma juga memproduksi berbagai vaksin untuk penyakit lain, seperti rabies serta flu musiman. Dengan kemampuan teknisnya yang terus berkembang, PT. Bio Farma tidak hanya melindungi kesehatan anak-anak di Indonesia, tetapi juga anak-anak di dunia.

Hasil

JICA telah memberikan bantuan di sektor perawatan medis dan kesehatan Indonesia dengan memperkuat fasilitas medis dan pengembangan sumber daya manusia dan juga berupaya untuk memperkuat sistem baru dan kelembagaan di bidang Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Maka:

- Buku KIA yang dikembangkan melalui bersama antara pihak Indonesia dan JICA, telah tersebar luas di seluruh Indonesia, memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran ibu, dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
- Membantu peningkatan kapasitas lembaga medis dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dibidang medis
- Persediaan vaksin yang dibutuhkan secara stabil dimungkinkan dengan diproduksinya vaksin Polio dan Campak di dalam negeri. Sebagai tambahan, upaya PT. Bio Farma melalui kerja sama dengan jaringan lembaga penelitian Jepang dan perusahaan farmasi memungkinkan pembuatan vaksin lain sehingga dapat turut berkontribusi untuk pembangunan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

Pendidikan

Tinjauan Umum

Di sektor pendidikan, JICA memberikan dukungan untuk pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

Di sektor pendidikan tinggi, sejak tahun 1970-an hingga saat ini JICA telah melaksanakan pengembangan fasilitas dan penyediaan peralatan serta materi (kurikulum) untuk universitas terkemuka seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin, Universitas Syiahkuala, dan Universitas Mulawarman.

Awal tahun 1990-an, proyek “Dukungan Pengembangan Pendidikan Tinggi (HEDS)” dimulai dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas penelitian dengan membentuk jejaring antar-universitas. JICA melaksanakan proyek ini melalui kerjasama dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), dimana Amerika Serikat memberikan bantuan untuk fakultas ekonomi, dan Jepang membantu fakultas teknik. JICA memberikan bantuan terhadap pencapaian gelar bagi dosen/instruktur, perbaikan fasilitas penelitian, dan pembentukan jejaring penelitian terhadap 11 universitas di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini menghasilkan peningkatan motivasi penelitian staf pengajar dan telah terbangunnya jejaring kerjasama penelitian antar-universitas dalam negeri maupun institusi internasional. Memasuki tahun 2000-an, proyek “ASEAN University Network/South East Asia Engineering Education Development Network (AUN/SEED-net)” dimulai sebagai pendekatan yang dikembangkan dan diwarisi hasil proyek HEDS. Dengan demikian, JICA memberikan dukungan untuk pembentukan jejaring penelitian bukan hanya pada universitas di Indonesia dan Jepang saja, tetapi juga universitas yang ada di ASEAN.

Sementara itu, memasuki tahun 1980-an, sehubungan dengan kemajuan industri, JICA mulai mengembangkan kerjasama dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) sebagai salah satu politeknik yang berperan dalam pendidikan kejuruan tingkat tinggi. Dan pada tahun 2000-an dengan tujuan mendorong kolaborasi Industri – Masyarakat – Universitas, JICA melakukan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada.

Untuk kerjasama di bidang pendidikan dasar dan menengah, sejak tahun 1990-an, JICA telah memulai kerjasama dalam pengembangan mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pengembangan IKIP untuk pendidikan guru matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA).

Setelah itu, dalam periode desentralisasi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an, dimulailah “Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Daerah (REDIP).” Proyek ini bertujuan untuk menciptakan sebuah model baru yang dikembangkan dengan pendekatan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan sekolah di tingkat SMP. Kerjasama itu sebagai tanggapan di tengah kondisi kewenangan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah yang lebih luas oleh pemerintah kabupaten dan kota akibat desentralisasi. Di sini model REDIP yang dibuat, telah menunjukkan hasil yang meluas sejalan dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan saat ini.



Uji coba keterbakaran dan kecepatan pembakaran biodiesel di ITB (Proyek SEED-net)



Kerjasama dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Kerjasama ini dimulai pada tahun 1986. Selain pengembangan fasilitas, peralatan dan materi, JICA juga memberikan bantuan peningkatan manajemen sekolah dan peningkatan kapasitas staf pengajar. Staf pengajar pertama-tama dilatih di akademi di Jepang, setelah itu memperoleh bimbingan dari para tenaga ahli Jepang di Indonesia, dengan demikian terbina budaya “pembelajaran tatap muka,” “persiapan buku pelajaran,” dan “memfokuskan pada pelajaran praktek.” Sejak menerima mahasiswa pertama pada tahun 1988, PENS – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sampai tahun 2009 telah menghasilkan 5.150 orang teknisi menengah yang mampu menghasilkan produk untuk sektor industri. Dilihat dari level penguasaan teknologi, PENS adalah salah satu politeknik unggul di Indonesia, tidak hanya menempati posisi tertinggi dalam berbagai pertandingan robot (*Robocon*) di dalam negeri, tetapi juga berprestasi di tingkat internasional (juara I pada tahun 2001). Selain itu, PENS bekerjasama dengan JICA mengadakan pelatihan bagi negara-negara berkembang lainnya. Dengan demikian, hasil dari kerjasama JICA telah berkembang di luar negara Indonesia.



PENS-ITS tidak hanya menempati posisi tertinggi dalam berbagai pertandingan robot di dalam negeri, tetapi juga berprestasi di tingkat internasional (juara I pada tahun 2001)

Hasil

Jepang merupakan negara donor bilateral terbesar di bidang pendidikan tinggi dan telah mendukung pengembangan/perbaikan di beberapa universitas terkemuka, pembentukan jejaring penelitian, dan lain sebagainya. Selain itu, pada sektor pendidikan dasar dan menengah, JICA telah melakukan kerjasama untuk meningkatkan peningkatan kualitas pada pendidikan dasar dan menengah. Dengan demikian hasil yang didapat adalah:

- Di bidang pendidikan tinggi, JICA memberikan bantuan pada area infrastruktur (pembangunan fasilitas), dan juga pada area sumber daya, (peningkatan kapasitas peneliti dan pembentukan jejaring peneliti) serta membantu meningkatkan kualitas para personil pendidikan tinggi di Indonesia.
- JICA membantu universitas berbasis teknologi dan politeknik meningkatkan fasilitas dan meningkatkan kapasitas pendidikan dan penelitian, serta menghasilkan sumber daya manusia yang trampil dalam industri utama.
- JICA telah membangun model manajemen berbasis sekolah dengan partisipasi masyarakat yang cocok di dalam kondisi desentralisasi Indonesia (model REDIP).

Pelatihan, Penerimaan Mahasiswa Asing, dan Pengiriman Relawan

Tinjauan Umum

Selain memberi dukungan kepada sektor tertentu, JICA juga telah membantu pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui penerimaan mahasiswa asing dan program pelatihan. Kemudian JICA juga mengirim relawan muda dan senior Jepang sebagai Tenaga Ahli Muda dan Tenaga Ahli Silver, yang dapat ikut berperan dalam pembangunan masyarakat Indonesia.

Pada program pelatihan yang penerimaannya dimulai dari tahun 1954, kegiatan ini sampai tahun 2008 telah menerima lebih dari 20.000 orang ke Jepang untuk mengikuti pelatihan. Jumlah peserta Indonesia menempati peringkat pertama di antara negara-negara yang menjadi sasaran penerimaan pelatihan JICA. Pada program pelatihan, pegawai pemerintah Indonesia, pegawai lembaga publik, dan LSM terkait diundang ke Jepang untuk mengikuti pelatihan dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan teknologi di Jepang. Dalam melaksanakan program pelatihan, JICA bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat Jepang, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan negara, sektor swasta, LSM, dan lain-lain. Sampai saat ini telah dilakukan berbagai pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang ada, mulai dari teknologi tinggi sampai pengetahuan tentang pembangunan pedesaan. Melalui program pelatihan di Jepang ini, diharapkan bahwa para peserta selain dapat memperoleh pengetahuan dan pembelajaran, juga dapat memahami latar belakang sosial berkembangnya teknologi dan pengetahuan tersebut, serta dapat mengembangkannya melalui pekerjaan sekembalinya di negara asal. Pendapat yang kerap diterima dari mantan peserta pelatihan adalah bahwa bukan hanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan, namun juga kesan tentang motivasi dan pendekatan personil Jepang dalam hal pekerjaan. Beberapa pelatihan di Jepang juga telah memberikan masukan terhadap pengembangan hal-hal yang baru di Indonesia, seperti Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan pembentukan organisasi pemadam kebakaran hutan (Manggara Agni dan Masyarakat Peduli Api). Kemudian, banyak juga peserta pelatihan yang berkarya di masing-masing bidang, termasuk pada Kabinet Indonesia bersatu tahap kedua pemerintahan Yudhoyono saat ini, ada tiga menteri, dua wakil menteri yang pernah berpartisipasi dalam pelatihan JICA.

Untuk program mahasiswa asing, berbagai lembaga pendidikan tinggi Jepang telah menerima lebih dari 2.000 personil Indonesia melalui berbagai skema kerjasama ODA. Para peserta yang mendapatkan gelar Master dan Doktor melalui program tersebut masing-masing diharapkan memberikan sumbangsinya bagi perkembangan masyarakat Indonesia secara umum dan peningkatan mutu penelitian dan pendidikan di perguruan tinggi Indonesia. Melalui program pengiriman relawan, sejak 1988 sampai dengan 2009, sebanyak 540 Tenaga Ahli Muda Jepang (atau *Japan Overseas Cooperation Volunteers*) telah ditugaskan di Indonesia. Sementara itu, sejak 1998 sampai dengan 2009 sebanyak 220 Tenaga Ahli Silver (atau *Senior Volunteers*) telah ditugaskan. Para relawan ini bekerja bersama masyarakat dengan mengikuti gaya hidup di tingkat akar rumput. Mereka bekerja di berbagai bidang untuk mendukung pembangunan bangsa dan pengembangan kapasitas SDM di Indonesia.

Dengan adanya personil Indonesia yang belajar di tengah-tengah masyarakat Jepang, dan sebaliknya personil Jepang yang bekerja di tengah-tengah masyarakat Indonesia melalui ketiga program kerjasama tersebut, diyakini telah dan akan memperkaya pertukaran antara kedua negara. Para pihak yang terkait tidak hanya terlibat dalam transfer pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pertukaran sosial dan budaya, sehingga turut berperan dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Jepang.



Para relawan bekerja bersama masyarakat dengan mengikuti gaya hidup setempat

Program Relawan JICA

Program relawan JICA dimulai sebagai kegiatan yang dilaksanakan JICA dengan anggaran ODA Jepang. Berdasarkan usulan dari negara mitra, dilakukan perekrutan orang yang memiliki pengetahuan, teknologi, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan itu dan berminat “memanfaatkan kemampuannya untuk masyarakat negara lain,” pemilihan personil yang tepat, dan mengirimnya ke negara tujuan.

Di tempat tujuan, mereka – sambil mengikuti gaya hidup masyarakat setempat – melakukan kerjasama teknik. Hal ini yang membedakan dengan Proyek Kerjasama Teknik.

Berdasarkan usia, dibagi menjadi Tenaga Ahli Muda (JOCV) (di bawah 39 tahun) dan Tenaga Ahli Silver (SV) (umur 40 ke atas). Pengiriman ke Indonesia untuk JOCV dimulai pada tahun 1988, SV dimulai pada tahun 1998.

Hasil

Sejak JICA memulai program penerimaan peserta pelatihan, banyak personil Indonesia yang telah menjalani pendidikan di Jepang. Pada saat yang sama, program relawan Jepang juga telah berperan serta dalam berbagai kegiatan di tingkat akar rumput di Indonesia. Melalui kerjasama ini:

- Para peserta program pelatihan dan penerimaan mahasiswa asing bukan hanya mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran saja, namun sekaligus pemahaman tentang masyarakat dan budaya Jepang yang menjadi latar belakang sosial berkembangnya teknologi dan pengetahuan tersebut, serta mengembangkannya sehingga dapat diterapkan di Indonesia.
- Melalui skema pengiriman Tenaga Ahli Muda dan Silver, para relawan Jepang berkesempatan untuk memahami masyarakat dan budaya Indonesia, serta memperluas pandangan dengan bekerjasama secara langsung karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pada saat yang sama, terjadi berbagai pertukaran dalam masyarakat dan institusi Indonesia yang menerima mereka.
- Program pengiriman relawan, pelatihan, dan penerimaan mahasiswa asing tidak hanya mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dan Jepang yang memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai negara mitranya, tetapi juga memperkuat hubungan antara kedua negara melalui pertukaran yang dilakukannya.

VII. Pelestarian Lingkungan dan Pembangunan Infrastruktur Sosial

Pengembangan dan Pengelolaan DAS



Proyek JICA yang dilaksanakan di DAS Brantas

Jenis Rencana Induk (M/P)	1960-an	1970-an	1980-an	1990-an	2000-an
MP-I (1961)	●				
MP-II (1973)		●			
MP-III (1985)			●		
MP-IV (1998)				●	
Proyek Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Dam and Hydro/Tenaga Hidro <ul style="list-style-type: none"> Bendungan Karangates Bendungan Kali Konto Bendungan Wilingi Bendungan Lojoyo Bendungan Sengguruh PLTA Tulungagung Bendungan Wihorejo - Perbaikan Sungai <ul style="list-style-type: none"> Sungai Porong Tengah DAS Brantas Kali Surabaya - Irigasi <ul style="list-style-type: none"> Delta Brantas Sungai Widas - Rehabilitasi dan Pengembangan Kapasitas <ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas sumber daya air yang telah ada 				

Pembangunan Daerah Aliran Sungai Terintegrasi pada Sungai Brantas

Proyek ini dimulai pada tahun 1958 sebagai pampasan perang. Pada tahun 1960 dimulai pembangunan bendungan serbaguna, pengembangan irigasi, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), perbaikan sungai melalui Pinjaman ODA Jepang. Proyek ini dimaksudkan untuk mengurangi kerusakan akibat banjir secara signifikan, membangun industri melalui fasilitas PLTA dan irigasi. Selain itu, banyak teknisi Indonesia menjadi terlatih melalui proyek ini.

Hasil

JICA mendukung pengembangan DAS yang terpadu, juga membantu proyek pengendalian banjir di kota-kota di wilayah utama. Dengan hal ini:

- Hasil dari pengembangan DAS secara terpadu di Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Jeneberang, selain menstabilkan kehidupan penduduk dengan mengurangi kerusakan banjir secara signifikan, dengan pelaksanaan pembangunan PLTA, pasokan air industri dan air minum, pembangunan irigasi, telah berkontribusi pada peningkatan kehidupan dan pendapatan penduduk, pembangunan ekonomi lokal.
- Kemudian, proyek dilaksanakan secara sistematis dalam jangka panjang dari menetapkan Rencana Induk sampai pelaksanaan proyek pada masing-masing DAS, dengan proses itu para teknisi Jepang dan Indonesia bekerja bersama-sama, sehingga terjadi pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
- Mengurangi secara signifikan kerugian di daerah rawan banjir melalui proyek pengendalian banjir.



Sistem peringatan banjir untuk Sungai Brantas

Manajemen Bencana

Tinjauan Umum

Dalam hal manajemen bencana, Jepang telah melakukan kerjasama untuk tahapan pencegahan dan pemulihan pasca-bencana. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meminimalkan dampak dari suatu bencana dan membantu pemulihan kembali secara cepat dan tepat pasca suatu bencana.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 129 gunung api aktif dalam suatu busur gunung api atau 17% dari jumlah seluruh gunung api di dunia. Pulau Jawa, yang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan di Indonesia, juga memiliki beberapa gunung api aktif sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar sejak dahulu telah tinggal di daerah rawan bencana yang sewaktu-waktu dapat mengancam kehidupan mereka. Selain bahaya letusan atau erupsi dari gunung api, masyarakat juga sering terancam bahaya banjir lahar hujan. Oleh sebab itu, penanggulangan terhadap bahaya gunung api sangat penting untuk dilakukan, karena dapat menimbulkan kerugian yang besar dan menghambat perekonomian. Melalui dukungan dari Jepang, pada tahun 1970-an telah diperkenalkan teknik pengendalian aliran lahar dan dilakukan Kerjasama Teknik untuk pengendalian aliran lahar di Gunung Merapi, Gunung Kelud dan Gunung Semeru. Sebagai realisasi Kerjasama Teknik di bidang pengendalian aliran lahar ini, pada tahun 1982 didirikan Volcanic Sabo Technical Centre di Yogyakarta untuk melatih para teknisi Indonesia dalam pengendalian aliran lahar dengan aplikasi Teknologi Sabo. Kerjasama dilanjutkan pada tahun 1992 dengan membentuk Sabo Technical Centre (Departemen Pekerjaan Umum), untuk menyebarluaskan pengetahuan di bidang aplikasi Teknik Sabo serta untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengendalian aliran sedimen baik di daerah gunung api maupun di daerah non-gunung api. Pada tahun 2001 - 2006 dilakukan Kerjasama Teknik untuk pengelolaan terpadu bencana sedimen dan sejak tahun 2006 dilakukan kerjasama untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dalam mitigasi bencana banjir bandang.

Memasuki tahun 2000-an, Indonesia banyak mengalami kejadian bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh (Desember 2004), gempa bumi di Yogyakarta (Mei 2006), gempa bumi di Sumatera Barat (September 2009) yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang sangat besar. Jepang telah mengirimkan tenaga bantuan untuk mengatasi kondisi darurat pada kejadian bencana-bencana tersebut dan juga melakukan Kerjasama Teknik untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pemulihan pasca bencana-bencana tersebut. Di samping itu juga membantu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan bencana di masa mendatang dengan menyusun perencanaan yang terpadu dalam penanggulangan bencana, meningkatkan sistem peringatan dini tsunami, membantu pembangunan rumah tahan gempa, serta memperkuat kapasitas dan kemampuan dalam hal manajemen bencana.

Hasil

Selama ini, disamping telah mendukung untuk mengatasi bahaya gunung api, JICA juga telah memberi dukungan sejak tahun 2000 untuk pemulihan pasca-bencana gempa bumi serta mendukung upaya untuk penguatan kapasitas dan kemampuan dalam manajemen bencana, seperti :

- Pada saat terjadi bencana letusan Gunung Merapi, Gunung Kelud dan Gunung Semeru telah melaksanakan upaya tanggap darurat secara cepat dan memberikan kontribusi dalam hal penerapan dan peningkatan teknologi pengendalian aliran lahar melalui pembangunan fasilitas pengendali aliran lahar dan penyusunan Rencana Induk.
- Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanganan bencana sedimen dan penguatan fungsi Sabo Technical Centre.
- Memberikan bantuan secara cepat untuk tanggap darurat pada saat terjadi bencana yang besar dan memberikan kontribusi pada tahap pemulihan pasca-kejadian bencana.



Dukungan terhadap Rekonstruksi Pasca Bencana di Aceh

Saat gempa bumi besar terjadi di laut di pulau Sumatra pada bulan Desember 2004, pemerintah Jepang, setelah pengiriman pasukan bantuan darurat, melaksanakan serangkaian proyek bantuan. Bantuan ini meliputi penyusunan Rencana Induk rekonstruksi kota Banda Aceh, bantuan pemulihan masyarakat, rekonstruksi infrastruktur darurat, termasuk sistem transportasi dan sumber daya air melalui bantuan hibah dan pinjaman. Setelah proyek darurat, JICA melaksanakan proyek pengembangan jejaring pemberdayaan masyarakat yang mandiri di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) selama 2 tahun sejak tahun 2007, dalam rangka meningkatkan penghidupan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pranata pemerintah daerah.



Proyek Pengembangan Kapasitas untuk Administrasi Gedung dan Penegakan Pembangunan Tahan Atas Gempa (2007-2011)

Proyek ini dimulai setelah terjadinya gempa di pesisir pulau Jawa yang menimbulkan banyak kerugian akibat rubuhnya rumah-rumah penduduk. Dukungan JICA diberikan dalam bentuk bantuan teknis untuk rekonstruksi rumah. Dengan fokus pada daerah-daerah rawan gempa, kegiatan proyek ini meliputi penyebaran informasi tentang metode peningkatan ketahanan rumah dan dukungan penguatan fungsi pemeriksaan bangunan oleh aparat pemerintah.



Survei dan investigasi kondisi lapangan pasca-banjir bandang di Jember (Januari 2005)



Tim Medis Jepang memberikan perawatan kepedapara korban yang terluka

Lingkungan Perkotaan dan Sistem Penyediaan Air Bersih & Pengelolaan Limbah

Tinjauan Umum

Pada sektor lingkungan perkotaan serta sistem penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah, JICA telah melakukan kerjasama pada bidang-bidang pelayanan air bersih, sistem drainase dan pengelolaan limbah, lingkungan perkotaan dan pengelolaan sampah, serta lingkungan permukiman dan perencanaan kota.

Kerjasama JICA pada bidang-bidang tersebut diawali dengan kerjasama di bidang pelayanan air bersih. Pada awal tahun 1960-an, JICA berkontribusi dalam perumusan Rencana Induk Pengembangan Sistem Tata Air di Jakarta, dan pada tahun 1970-an berkontribusi pula pada segi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dari sistem tersebut. Pada tahun 1980-an, JICA turut pula mendanai pembangunan infrastruktur dari sistem tata air dimana tidak hanya di Jakarta, namun juga merambah pada kota-kota lainnya, seperti Surabaya dan Makassar. Mulai pertengahan tahun 1980-an, JICA memulai kerjasamanya di bidang pembangunan sarana "Pusat Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman" dan membantu menyediakan prasarananya melalui Kerjasama Teknik. Dalam pengembangannya, JICA telah mendukung pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan yang diperuntukkan bagi para pelaku di bidang perancangan, pemeliharaan, serta pengelolaan pelayanan air bersih. Pada tahun 1990-an, JICA melakukan pula kerjasama pada pengembangan sistem pelayanan air bersih pada kota-kota berskala kecil lainnya, yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Indonesia, dalam rangka memperkecil kesenjangan antar wilayah. Dan memasuki tahun 2000-an, JICA telah mendukung peningkatan pengelolaan perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai tanggapan terhadap desentralisasi.

Kontribusi JICA dalam penanganan permasalahan sistem drainase dan penanganan limbah, yang menjadi komponen utama untuk mencegah bahaya banjir, dimulai di Jakarta pada tahun 1980-an, yang dilanjutkan dengan perwujudan proyek-proyek perbaikan sarana dan prasarana di Denpasar dan Yogyakarta pada tahun 1990-an. Di Bali, JICA menghubungkan proyek pengembangan lingkungan perkotaan di Denpasar dengan proyek perlindungan pantai, dimana berkontribusi pada perlindungan pantai-pantai di wilayah Bali, yang selama ini menjadi daerah tujuan wisata penting bagi propinsi tersebut.

JICA memulai kerjasamanya di bidang pengelolaan lingkungan pada tahun 1990-an. Sebagai bidang kerjasama yang baru dengan Indonesia, JICA mendukung peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menguji tingkat pencemaran udara dan air sungai, serta menyediakan Kerjasama Teknik yang sesuai. Selanjutnya, JICA juga mendukung pengembangan sistem "Eco Label" pada tahun 2000-an. Pada bidang penanganan limbah, JICA telah turut mengembangkan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan penyediaan armada pengangkut sampah di Jakarta, dimana permasalahan sampah/limbah selalu menjadi permasalahan serius.



Peningkatan Banjir Kanal Barat (BKB) di Jakarta



Pusat Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman



Pemberian pelatihan bagi para personil di Pusat Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Peningkatan Kualitas Lingkungan Perkotaan di Jakarta

JICA telah mewujudkan serangkaian kerjasamanya dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan di Jakarta. Diantara bidang-bidang yang diperuntukkan tersebut ada sistem pelayanan air bersih dan pembuangan limbah, peningkatan sistem drainase, serta pembangunan sarana dan prasarana pembuangan sampah.

Terkait dengan hal tersebut, kerjasama JICA pada bidang pelayanan air bersih di Jakarta mencakup formulasi Rencana Induk, pembangunan dua pusat pemurnian air, pengembangan jaringan distribusi air bersih, serta pelatihan bagi para personil di bidang pelayanan air bersih.

Selain itu, dikarenakan bencana banjir acap kali melanda Jakarta, JICA telah mendukung penyediaan fasilitas sistem pengendali banjir melalui pelaksanaan beberapa proyek pengendali banjir dan peningkatan sarana dan prasarana drainase di Ibukota.

Kerjasama JICA juga meliputi perumusan Rencana Induk bagi pembuangan sampah, pembangunan lokasi-lokasi pembuangan sampah, serta menyediakan berbagai armada pengumpul sampah sebagai suatu bentuk tanggapan terhadap pertumbuhan penduduk Jakarta yang sedemikian pesat.

Hasil

JICA telah melakukan kerjasama yang diperuntukkan bagi peningkatan pelayanan air bersih, yang mendapatkan skala prioritas diantara segala bentuk pengembangan infrastruktur sosial lainnya. JICA juga mendukung pengelolaan lingkungan perkotaan, peningkatan sistem pembuangan limbah, serta penanganan sampah demi mengimbangi laju pembangunan dan penambahan penduduk di Indonesia. Selanjutnya:

- JICA telah melakukan kerjasama yang diperuntukkan pada bidang pelayanan air bersih, pengelolaan limbah dan sistem drainase, serta pengelolaan sampah di Jakarta. Khusus untuk bidang pelayanan air bersih, JICA mendukung Pemerintah Indonesia dalam keberhasilannya mewujudkan tambahan penyediaan air bersih kepada 3,4 juta penduduk. JICA turut pula berkontribusi bagi peningkatan tingkat pengumpulan sampah dan mengurangi terjadinya bencana banjir, serta meningkatkan lingkungan hidup di Ibukota secara keseluruhan.
- JICA juga berkontribusi kepada penyediaan air bersih di Surabaya, Makassar, serta kota-kota penting lainnya, baik yang besar maupun berskala kecil.
- JICA tidak hanya meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan air bersih, namun juga berkontribusi bagi penguatan organisasi dengan melatih para personil di bidang pengelolaan pelayanan air bersih, serta meningkatkan operasionalisasi dan pelayanan PDAM.
- JICA berkontribusi pada usaha-usaha untuk memperkuat sistem dan kapasitas dalam rangka menanggapi berbagai permasalahan lingkungan perkotaan yang menjadi salah satu isu baru di Indonesia.

Konservasi Hutan dan Alam

Tinjauan Umum

Analisa citra satelit pada tahun 2006 menjelaskan bahwa 97,17 juta hektar area, atau 53,6 % dari daratan di Indonesia merupakan kawasan hutan yang didominasi oleh hutan hujan tropis. Fakta ini membuat Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang memiliki hutan hujan tropis terbesar setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Selain itu, Indonesia adalah negara terbesar pemilik hutan bakau (*mangrove*) di dunia, sekitar seperempat luasan *mangrove* di dunia (18 juta hektar) terdapat di Indonesia. 70% dari total panjang garis pantai ditumbuhi oleh terumbu karang yang kaya akan keragaman hayati. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sekitar 325.000 jenis satwa dan tumbuhan liar, atau 20% dari total spesies di planet bumi terdapat di Indonesia.

Sejalan dengan latar belakang tersebut, JICA telah melakukan kerjasama dalam bidang industri kehutanan untuk mendukung kehutanan berkelanjutan di tahun 1970-an. Kerjasama ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sumber daya hutan sebagai sarana meningkatkan pendapatan skala internasional dan menyediakan tenaga kerja.

Namun dengan terjadinya degradasi sumber daya hutan, JICA mengubah fokus kerjasamanya menjadi penelitian terhadap hutan hujan tropis dan manajemen hutan di tahun 1980-an, dengan maksud untuk meningkatkan upaya konservasi hutan. Kemudian pada tahun 1990-an dimulai kerjasama teknis untuk mengembangkan jenis pohon yang sesuai untuk pelestarian hutan, dimana kerjasama ini menghasilkan berbagai format kerjasama lainnya dalam hal pelestarian hutan. JICA juga memulai kerjasama perlindungan ekosistem *mangrove* yang juga telah terdegradasi akibat pembukaan tambak dan kegiatan lain.

Selain itu, JICA juga bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam hal manajemen dan perlindungan keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat di bumi Indonesia. Kerjasama ini melingkupi perbaikan fasilitas, peralatan dan material, pengembangan spesimen biologi, dan pembuatan database keanekaragaman hayati. Kemudian juga bekerja untuk memperkuat pengelolaan taman nasional untuk konservasi habitat satwa dan tumbuhan. Sejak pertengahan 1990-an, JICA juga memulai Kerjasama Teknik yang dimaksudkan untuk mencegah kebakaran hutan.

Jika mempertimbangkan emisi karbon yang berasal dari hilangnya hutan dan rusaknya hutan gambut, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar yang memproduksi gas rumah kaca setelah Cina dan Amerika Serikat. JICA membentuk bantuan keuangan dunia pertama untuk penanggulangan terhadap perubahan iklim dan mulai menyediakan "Pinjaman Program untuk Perubahan Iklim" untuk mendukung bantuan tersebut, dimana inisiasi pertama dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Perancis dan diikuti oleh Bank Dunia di tahun 2008. Dengan demikian, JICA menyediakan bantuan keuangan untuk pendekatan yang menyeluruh terhadap perubahan iklim. Selanjutnya JICA berencana untuk memulai kerjasama teknis untuk meningkatkan kapasitas untuk memantapkan keadaan disekitar isu perubahan iklim dan memformulasi rencana aksi yang dimulai tahun 2010.



Latihan pemadaman kebakaran hutan yang diikuti berbagai perwakilan kelompok



Tanggapan terhadap Kebakaran Hutan

Suatu kebakaran hutan sering kali menjadi bencana besar. Kebakaran hutan semacam itu pernah sampai menghabiskan beberapa juta hektar areal hutan di pulau Sumatera dan Kalimantan. Berbagai permasalahan regional pun timbul dari kebakaran hutan, seperti asap yang mencapai wilayah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta memberikan dampak serius terhadap industri pariwisata, transportasi dan kesehatan manusia. Sementara itu, Jepang telah memberikan berbagai dukungan sehubungan dengan hutan, baik dari sisi pencegahan maupun langkah-langkah terhadap kebakaran hutan yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa contoh dukungan yang telah diberikan:

-Bantuan darurat dalam bentuk penyediaan peralatan pemadam kebakaran serta pengiriman tim bantuan darurat Jepang pada saat kebakaran terjadi.

-Dukungan terhadap pembangunan sistem deteksi dini titik-titik kebakaran hutan (hot spots) dengan memanfaatkan satelit serta pengembangan peta risiko penyebaran api.

-Dukungan terhadap perumusan panduan pencegahan kebakaran hutan serta pembentukan organisasi pemadam kebakaran (Manggara Agni dan Masyarakat Peduli Api) yang diilhami dari tim pemadam kebakaran Jepang untuk Taman Nasional.

-Dukungan terhadap perumusan peraturan propinsi di bidang pencegahan kebakaran hutan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan yang dipimpin oleh masyarakat setempat di Propinsi Riau, Propinsi Jambi, dan Propinsi Kalimantan Barat dimana sering terjadi kebakaran hutan.

Hasil

JICA telah memberikan bantuan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang sangat berharga bagi Indonesia. Sebagai hasilnya:

- Telah berkontribusi pada konservasi hutan dari sudut pandang jangka panjang (penelitian, pengembangan pohon tanam, dan lain-lain)
- Bekerjasama dalam konservasi keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat berharga-tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia-dan pengembangan spesimen biologi. Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyediakan sumber daya yang berharga di seluruh dunia, terus bekerja dengan penuh semangat seperti penelitian bersama dengan para ilmuwan di dunia.
- Berupaya sejak dini untuk memperkenalkan dan memantau secara ilmiah kebakaran hutan yang juga menjadi isu internasional. Selain diperkenalkannya sistem pemantauan ilmiah, juga memberi dukungan untuk pendirian organisasi pemadam kebakaran.
- Mendukung upaya Pemerintah Indonesia terhadap perubahan iklim, mendukung pelaksanaan secara menyeluruh pembuatan kebijakan dan sistem, pembangunan infrastruktur, kerjasama teknis dengan bantuan keuangan.